

PELUANG DAN TANTANGAN PENCAPAIAN SDGs DI KABUPATEN POHUWATO Jejak Menuju Keberhasilan Pengembangan Kawasan

Jejak Menuju Keberhasilan Pengembangan Kawasan Ekonomi Wilayah Teluk Tomini

> Boby Rantow Payu Rezkiawan Tantawi Nurharyati Panigoro Yulianti Toralawe



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PELUANG DAN TANTANGAN PENCAPAIAN SDGs DI KABUPATEN POHUWATO

Jejak Menuju Keberhasilan Pengembangan Kawasan Ekonomi Wilayah Teluk Tomini

Penulis:

Boby Rantow Payu Rezkiawan Tantawi Nurharyati Panigoro Yulianti Toralawe

Desain Cover:

Editor: Tahta Media

Proofreader: Tahta Media

Ukuran: vi,86, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-389-9

Cetakan Pertama: Mei 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

(Bupati Kabupaten Pohuwato)



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbitnya buku ini telah menambah pengetahuan dan wawasan baru tentang daerah Bumi Panua yang kita cintai, terutama bagi pemerintah daerah, cendekiawan, mahasiswa, dan masyarakat yang membutuhkan. Berbagai pencapaian berdasarkan data dan informasi kajian yang disajikan secara sistematis dan mudah dipahami tergambar jelas pada

buku ini, sehingga memudahkan seluruh sektor terkait dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan dalam pencapaian SDGs di Pohuwato, salah satu daerah di pesisir Teluk Tomini. Dari 13 kecamatan, 10 kecamatan berada di pesisir, sehingga kemajuan Kawasan Teluk Tomini juga akan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Pohuwato.

Pada tahun 2024, Kabupaten Pohuwato memasuki usia 21 tahun di mana tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan dengan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 18,08 persen dan turun menjadi 17,64 persen pada tahun 2024. Demikian pula dengan kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pasca COVID-19. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami perlambatan sebesar minus 0,18 persen, namun pada tahun 2024 mengalami kemajuan signifikan mencapai 4,4 persen. Keberhasilan ini berkat pemenuhan beberapa komponen SDGs dengan baik, meskipun masih ada yang belum optimal mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, buku ini memberikan intisari untuk memaksimalkan komponen mana yang perlu ditingkatkan, menjadi referensi bagi pimpinan OPD dan instansi terkait dalam menciptakan inovasi yang berdampak positif terhadap pencapaian SDGs.

Atas semua hal tersebut, atas nama pemerintah dan masyarakat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang mendalam serta ucapan terima kasih kepada tim yang telah menyusun buku ini. Saya berharap buku ini disebarluaskan dan menjadi bahan bacaan, terutama bagi pimpinan OPD, dengan harapan mereka dapat melahirkan upaya-upaya konkret dalam bentuk program dan kegiatan di masa mendatang, yang tentunya akan menjadi solusi

atas permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan masyarakat. Sekali lagi, terima kasih dan selamat membaca.

Demikian, terima kasih Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bupati Pohuwato

Saipul A. Mbuinga, S.H

DAFTAR ISI

Kata I	Pengantar	iv
Daftar	· Isi	vi
Bab 1	Pendahuluan	1
Bab 2	Selayang Pandang Sdgs	4
Bab 3	Mengenal Pohuwato Sebagai Wilayah Unggulan Di Kawasan Teluk Tomini	36
A.	Kedudukan Dan Potensi Wilayah Kabupaten Pohuwato Di Kawasan Ekonomi Teluk Tomini	37
B.	Daya Saing Kabupaten Pohuwato	11
C.	Potensi Pertumbuhan Wilayah	19
Bab 4	Potret Keberhasilan Sdgs Kabupaten Pohuwato	52
A.	Potret Capaian Sdgs Kabupaten Pohuwato	52
B.	Sinkronisasi Indikator Sdgs Kategori D Dan E Yang Bersesuaian Dengan Rpjmd Dan Iku Kabupaten Pohuwato	50
C.	Penentuan Prioritas Kriteria Pencapaian Sdgs	51
Bab 5	Peluang Dan Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Pohuwat	
A.	Prioritas Isu Sdgs	56
В.	Kesenjangan Antara Harapan Dan Realisasi Kebijakan	15
C.	Peluang Dan Tantangan Pencapaian Target Sdgs	30
Bab 6	Penutup	33
Dafan	ongi.	2.1

BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai dimensi, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, pembangunan yang telah dilakukan seringkali mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkannya (Ulum Nginanda, 2017; Susiana, 2025). Hal ini telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang merugikan manusia. Kesadaran global terhadap masalah lingkungan telah lama ada. Merespon hal tersebut, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi penting dalam konteks daerah karena memberikan kerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek pembangunan. SDGs memungkinkan daerah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dicapai berkelanjutan, merata, dan memperhitungkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Iskandar, 2020). Dengan memprioritaskan tujuan-tujuan SDGs, daerah meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara berkelanjutan, seperti dengan memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan penting yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempati posisi sentral dalam agenda global untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. SDGs, dengan serangkaian tujuan yang komprehensif, tidak hanya mencakup upaya untuk mengakhiri kemiskinan, tetapi juga untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh di seluruh dunia (Susiana, 2015).

Teluk Tomini memiliki kedudukan yang strategis dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) karena merupakan bagian dari pesisir Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks SDGs, Teluk Tomini memiliki potensi untuk menjadi pusat

aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan yang penting bagi kehidupan masyarakat setempat dan global (Payu et al, 2023). Kabupaten Pohuwato, sebagai bagian dari kawasan Teluk Tomini, tak lepas dari agenda SDGs. Terletak di tepi Teluk Tomini, kabupaten ini memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan keberagaman sumber daya alamnya dan masyarakat yang beragam, Pohuwato memiliki peluang emas untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam segala aspek pembangunannya.

Kabupaten Pohuwato kini telah mencapai usia 20 tahun, yang jika diibaratkan dengan manusia, Kabupaten Pohuwato sedang beranjak remaja di mana berbagai dinamika pembangunan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan, ditandai dengan peningkatan dalam berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Kabupaten ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, kaya akan potensi sumber daya alamnya, dan berperan sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Gorontalo dan wilayah Teluk Tomini. Dengan potensi tersebut, diharapkan Kabupaten Pohuwato dapat meningkatkan ekonomi dan daya saingnya, dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, pemanfaatan potensi sumber daya yang beragam, demi mencapai kesejahteraan maksimal bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan pembangunan daerah dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urgensi pengembangan kawasan ekonomi di Teluk Tomini semakin menonjol. Teluk ini bukan hanya sebagai ladang sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang vital bagi masyarakat setempat. Pembangunan kawasan ekonomi di sini tak hanya akan memberikan dorongan ekonomi bagi warga lokal, tetapi juga berpotensi menjadi model bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Penulisan buku ini bertujuan untuk menggali potensi yang ada serta mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi dalam pencapaian SDGs di Kabupaten Pohuwato. Dengan pemahaman yang mendalam tentang situasi saat ini, kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Harapan penulis atas terbitnya buku ini tidak hanya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Pohuwato, tetapi juga akan menjadi sumber inspirasi bagi upaya

serupa di daerah-daerah lain. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum dalam merangkul prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

BAB 2

SELAYANG PANDANG SDGS

Pada tahun 2012, PBB menetapkan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya tentang pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2012). Sebelum SDGs, pada tahun 2000, terdapat Millennium Development Goals (MDGs) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dasar, kesetaraan gender, dan menurunkan angka kematian anak. Namun, ketika MDGs berakhir pada tahun 2015, masih ada banyak tantangan pembangunan yang perlu diatasi. Maka dari itu, SDGs diadopsi pada tahun yang sama sebagai pengganti MDGs, dengan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang lebih luas dan komprehensif, mencakup aspek penghapusan kemiskinan, kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan tata kelola global (United Nations, 2015). Setiap tujuan memiliki serangkaian target spesifik yang diharapkan tercapai pada atau sebelum tahun 2030. Latar belakang terbentuknya SDGs adalah untuk memberikan kerangka kerja komprehensif bagi negara-negara di seluruh dunia agar dapat bekerja sama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Sachs, et al, 2019).

Mulai tahun 2016, Sustainable Development Goals (SDGs) resmi menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) sebagai panduan pembangunan global hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang berlaku untuk semua negara tanpa kecuali, yang mencakup aspek seperti perdamaian, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan terbuka, dan kerjasama multi-pihak. Proses pembentukan SDGs melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk melalui survei Myworld, yang berbeda dengan proses perumusan MDGs. Prinsip utama yang dibawa oleh SDGs adalah "no one left behind" dengan penekanan pada kesetaraan antarnegara dan antarwarga

negara. SDGs berlaku secara universal untuk semua negara anggota PBB, termasuk negara maju, berkembang, dan miskin (Hoelman et. Al., 2015).

Tujuan 1. Menghapus Segala Bentuk Kemiskinan

1) Persentase penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 per kapita per hari

Indikator ini ditetapkan sebagai persentase populasi yang tinggal di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu orang-orang yang mengonsumsi (atau memiliki pendapatan) kurang dari \$1,25 per hari. Ambang batas \$1,25 digunakan sebagai standar perbandingan antarnegara saat dikonversi dengan paritas daya beli (PPP) untuk konsumsi. Pengukuran kemiskinan ini mempertahankan nilai riil konstan dari garis kemiskinan dari waktu ke waktu, memungkinkan penilaian yang konsisten terhadap kemajuan dalam upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim.

Data dasar untuk indikator ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencatat pengeluaran per kapita penduduk. Sejak 1993, informasi ini telah tersedia untuk seluruh provinsi, dan mulai tahun 2008, BPS (Badan Pusat Statistik) telah dapat menyajikannya untuk tingkat kabupaten/kota menggunakan data Susenas KOR. Sejak 2011, Susenas Konsumsi lengkap dilakukan setiap triwulan. Bank Dunia menghitung garis kemiskinan ini setiap tahun, memungkinkan penyajian indikator ini secara tahunan. Susenas juga memberikan informasi tentang karakteristik kepala rumah tangga miskin, termasuk karakteristik demografis, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Ini meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, status kepala rumah tangga perempuan, usia rata-rata kepala rumah tangga (demografi), lama rata-rata sekolah, tingkat kemampuan membaca dan menulis, serta tingkat pendidikan kepala rumah tangga (pendidikan), serta jenis usaha atau sektor dan jumlah jam kerja per minggu (ketenagakerjaan).

2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan

Indikator yang telah dimodifikasi dari MDGs didefinisikan sebagai persentase populasi yang tinggal di bawah garis kemiskinan nasional, yakni individu yang mengonsumsi (atau memiliki pendapatan) di bawah jumlah tertentu per orang per bulan. Ambang kemiskinan ini ditetapkan pada tingkat nasional, yang menandakan status kemiskinan seseorang. Penting untuk membedakan garis kemiskinan nasional antara daerah perkotaan dan pedesaan untuk mempertimbangkan perbedaan biaya hidup.

Sumber data dasarnya dan cara memecah data tetap sama dengan indikator sebelumnya. Garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh BPS, berdasarkan pada konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan nonmakanan, yang diukur dari segi pengeluaran. BPS melakukan perhitungan kemiskinan setiap bulan Maret dan September, dengan tingkat penyajian data hingga tingkat provinsi. Perhitungan kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan sekali setahun tanpa membedakan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

3) Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial

Akses yang memadai terhadap perlindungan sosial diakui sebagai hak dasar menurut Deklarasi Universal HAM, namun lebih dari setengah penduduk dunia belum tercakup dalam jaringan perlindungan sosial. Indikator ini mengukur persentase populasi yang mendapat perlindungan sosial, yang mencakup 10 elemen menurut standar ILO, seperti layanan kesehatan, tunjangan sakit, perlindungan bagi penyandang cacat dan lanjut usia, serta bantuan bagi ibu, anak, pengangguran, dan korban. Perlindungan sosial dapat berupa intervensi pasar tenaga kerja, asuransi sosial, dan bantuan sosial seperti bantuan tunai bersyarat.

Di Indonesia, program bantuan dan perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan memenuhi hak dasar individu dan rumah tangga miskin, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Program-program seperti Jamkesmas, PKH, Raskin, dan BSM ditujukan kepada kelompok masyarakat sangat miskin. Data untuk indikator ini berasal dari Susenas yang mencatat proporsi rumah tangga penerima program perlindungan sosial, dengan pengumpulan data dilakukan setiap tahun hingga tingkat kabupaten/kota. Meskipun data tidak bisa didisagregasi berdasarkan gender dan umur penerima bantuan, survei

perlindungan sosial yang dilakukan pada triwulan I tahun 2013 memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Survei tersebut, yang berkolaborasi antara TNP2K dan BPS, bertujuan untuk mengukur dampak program perlindungan sosial terhadap kesejahteraan individu, rumah tangga, dan negara. Data dari survei ini dapat disagregasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah kota-desa hingga tingkat provinsi.

4) Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan multidimensi ekstrim

Analisis kemiskinan multidimensi bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek kemiskinan yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai tingkat kemiskinan dan kekurangan. Beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur kemiskinan multidimensi mencakup alat penilaian kemiskinan multidimensional yang dikembangkan oleh IFAD, serta Indeks Kemiskinan Multidimensional (MPI) yang lebih dikenal yang digunakan oleh Human Development Report Office UNDP. MPI mengukur kemiskinan melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, dengan menimbang beberapa subindikator dalam masing-masing dimensi. Namun, pendekatan ini telah dikritik karena pengelompokan yang terlalu luas dan pembobotan yang tidak tepat pada sub-indikator.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kelemahan ini, SDSN mendukung pengembangan indikator baru yang lebih sesuai dengan konsep kemiskinan multidimensi dan memastikan konsistensi dengan prioritas MDG. Indikator baru ini akan melacak kekurangan ekstrim dalam berbagai bidang seperti gizi, pendidikan, kesehatan, akses air bersih, sanitasi, akses memasak modern, akses listrik yang dapat diandalkan, serta kehilangan aset modern. Tambahan indikator mungkin juga mencakup aspek lain seperti aset pertanian, kerentanan rumah tangga, paparan terhadap bencana alam, keamanan fisik, keterhubungan sosial, isolasi sosial, dan kesejahteraan psikologis. SDSN mengusulkan penggunaan metode Alkire dan Foster serta menetapkan ambang batas dari dua atau lebih dimensi untuk menentukan status kemiskinan seseorang. Penetapan ambang batas ini akan melibatkan diskusi

partisipatif dan konsultasi ahli, serta dapat disesuaikan dengan konteks nasional.

5) Persentase perempuan dan laki-laki di daerah pedesaan yang memiliki hak atas lahan

miskin Kemampuan masyarakat di pedesaan untuk mempertahankan kepemilikan mereka atas lahan dan sumber daya alam yang mereka butuhkan memiliki dampak penting pada pembangunan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan. Namun, masih banyak rumah tangga miskin di pedesaan yang menghadapi ancaman terhadap akses mereka terhadap lahan dan sumber daya alam. Salah satu isu yang kontroversial adalah akuisisi lahan dalam skala besar oleh investor asing dan domestik, yang telah menyoroti pentingnya hak atas lahan dan masalah investasi pertanian yang bertanggung jawab dalam agenda pembangunan global. Untuk mengukur situasi ini, diusulkan dua indikator baru: persentase penduduk yang memiliki sertifikat tanah, dan persentase penduduk yang tidak takut akan kemungkinan perampasan tanah secara sewenang-wenang.

Meskipun dokumentasi hak kepemilikan tanah penting, indikator tersebut tidaklah cukup, sehingga pengukuran persepsi juga diperlukan untuk memberikan informasi tambahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia telah mengembangkan program prioritas legalisasi aset untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat miskin di pedesaan. Program ini mencakup legalisasi aset seperti tanah petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengukur keberhasilan program ini, indikator proksi yang digunakan mencakup jumlah bidang tanah yang bersertifikat dan perkembangan program legalisasi lahan oleh BPN. Meskipun data persepsi masyarakat tentang keamanan kepemilikan tanah masih belum tersedia, hal ini menjadi batasan dalam penggunaan ukuran persepsi sebagai indikator. Oleh karena itu, data tidak dapat didisagregasi berdasarkan jenis kelamin pemilik aset.

6) Kerugian bencana alam akibat iklim maupun bukan iklim menurut daerah perkotaan pedesaan

Banyak kota dan pedesaan di seluruh dunia mengalami meningkatnya risiko bencana alam, termasuk kejadian yang terkait

dengan iklim ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat risiko tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kerugian yang dialami baik oleh daerah perkotaan maupun pedesaan akibat bencana alam, termasuk kerugian manusia dan ekonomi, yang dibagi berdasarkan kejadian yang terkait dengan iklim dan tidak terkait dengan iklim. Bencana alam yang terkait dengan iklim meliputi peristiwa hidrometeorologi seperti badai dan banjir, kejadian iklim ekstrem seperti suhu tinggi dan kekeringan, serta peristiwa biologis seperti epidemi.

Langkah-langkah adaptasi dan pengurangan risiko bencana sangat penting untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari bencana alam, terutama pada sektor pertanian dan daerah pedesaan. Indikator ini juga akan memantau kerugian ekonomi, termasuk kerugian pada tanaman dan hewan produksi, serta dampaknya pada kinerja ekonomi makro pasca-bencana. BNPB memiliki basis data yang disebut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), yang mencatat historis kejadian bencana di Indonesia sejak tahun 1815. Melalui DIBI, indikator dapat didisagregasi berdasarkan jenis bencana dan wilayah hingga tingkat kabupaten/kota, serta korban bencana dapat dianalisis berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Mencanangkan Pertanian Berkelanjutan

1) Persentase penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum

Indikator ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan sebagai proporsi populasi yang mengalami kelaparan atau kekurangan makanan, dengan tiga parameter pengukuran: (i) Jumlah makanan yang tersedia untuk konsumsi per orang per hari dalam tiga tahun rata-rata bergerak, (ii) Tingkat kesenjangan dalam akses terhadap makanan, dan (iii) Konsumsi energi minimum yang dibutuhkan oleh individu dalam kilo kalori per hari. Data untuk indikator ini dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencatat persentase penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (1400 dan 2000 kkal per kapita per hari). Namun, keterbatasan dalam pengumpulan

data menyebabkan ketidakmampuan untuk menjelaskan ketahanan pangan di tingkat intra-rumahtangga, sehingga disparitas akses pangan berdasarkan jenis kelamin tidak dapat diidentifikasi.

2) Persentase penduduk yang kekurangan salah satu dari mikronutrien (vitamin dan mineral): zat besi, zink, yodium, vitamin A, folat, dan vitamin B12

Meskipun penting untuk kesehatan, kekurangan mikronutrien sering terjadi di beberapa wilayah, dipengaruhi oleh pola makan dan kemiskinan. Kekurangan ini dapat berdampak serius, terutama pada ibu hamil dan anak-anak, dan dapat berlangsung sepanjang hidup. Enam mikronutrien vang paling umum kekurangannya meliputi besi, seng, yodium, serta vitamin A, B12, dan folat. Diperlukan pengembangan indikator global untuk mengukur kekurangan mikronutrien secara komprehensif. Indikator ini perlu dibangun berdasarkan evaluasi menyeluruh dari data mikronutrien yang ada dan kemungkinan pengumpulan data sesuai dengan tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Tujuannya adalah untuk melacak setiap individu yang mengalami kekurangan mikronutrien, bukan hanya kekurangan zat besi seperti yang terjadi pada MDGs. Sejumlah ahli juga menyarankan penambahan vitamin D dalam daftar kekurangan mikronutrien ini, namun pertanyaan tersebut perlu dijawab sebelum indikator ini dimasukkan ke dalam kerangka pemantauan pasca-2015. Indikator yang melengkapi defisiensi mikronutrien adalah anemia pada wanita yang tidak sedang hamil.

3) Prevalensi balita dengan keadaan stunting

Prevalensi stunting pada balita merupakan salah satu indikator yang diperoleh dari Riskesdas. Indikator ini mengukur persentase balita yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari rata-rata tinggi badan pada kelompok referensi populasi. Data tinggi badan pada Riskesdas dijadikan dasar analisis untuk menilai status gizi dan tinggi badan setiap balita, yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai standar (Z-score) menggunakan standar antropometri anak-anak WHO 2005. Keadaan stunting pada anak-anak menunjukkan dampak yang luas dari kurangnya gizi kronis. Stunting dapat memiliki konsekuensi serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dimana bukti

menunjukkan bahwa efek dari stunting, terutama pada perkembangan otak pada usia dini, sulit untuk diperbaiki pada usia yang lebih tua meskipun jika anak menerima nutrisi yang memadai. Oleh karena itu, indikator ini menyoroti urgensi pemberian nutrisi yang memadai bagi anak-anak.

4) Kesenjangan hasil panen pertanian

Indikator ini memantau disparitas antara hasil panen aktual dengan hasil panen yang dapat dicapai dengan manajemen yang optimal, mempertimbangkan faktor iklim dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Negara dapat menetapkan kebijakan untuk mencapai setidaknya 80 persen dari potensi hasil panen dengan penggunaan air yang efisien, serta mendorong penerapan kebijakan dan teknologi yang tepat. Indikator ini juga membandingkan antara produksi aktual tanaman pangan dengan target produksi yang telah ditetapkan. Tanaman pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai menjadi fokus dalam indikator ini karena merupakan komoditas strategis dan prioritas Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Data produksi aktual diperoleh dari Survei Ubinan yang dilakukan oleh BPS sejak tahun 1968 dengan frekuensi empat bulanan, sementara target produksi ditetapkan dalam program lima tahunan Kementan. Ketersediaan data memungkinkan indikator ini untuk didisagregasi berdasarkan jenis tanaman pangan prioritas dan wilayah, baik secara nasional maupun provinsi.

5) Jumlah petugas penyuluh pertanian per 1000 petani

Untuk mencapai hasil pertanian yang berkelanjutan di seluruh wilayah, sistem penyuluhan pertanian baik dari sektor publik maupun swasta harus berfungsi dengan baik. Indikator yang disarankan oleh FAO mengevaluasi jumlah profesional pertanian yang berbagai sektor yang memberikan layanan pelatihan, informasi, dan dukungan penyuluhan serta jasa lainnya kepada petani dan usaha kecil menengah di rantai nilai pedesaan. Kementan mencatat jumlah penyuluh pertanian setiap tahunnya hingga tingkat kabupaten. Penyuluh pertanian terdiri dari PNS, tenaga harian lepas, dan tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Indonesia menargetkan minimal satu penyuluh untuk setiap desa yang memiliki potensi pertanian.

Indikator ini bisa diperinci menurut provinsi untuk memantau ketersediaan penyuluh di setiap desa, termasuk kualifikasi pendidikan, jenis kelamin, jenjang jabatan, subsektor, dan usia penyuluh pertanian. Selain itu, persentase petani yang menerima penyuluhan pertanian dapat diperoleh dari Survei Pendapatan Petani (SPP) yang diadakan setiap sepuluh tahun. Data ini dapat dipecah hingga ke tingkat kabupaten/kota dan dapat dianalisis berdasarkan jenis penyuluhan yang diikuti, seperti budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, dan lainnya. Karena survei ini hanya dilakukan setiap sepuluh tahun, perkembangan indikator tidak dapat diamati dalam jangka pendek.

6) Efisiensi Penggunaan Pupuk Nitrogen

Nitrogen memegang peran penting dalam produktivitas, keberlanjutan, dan dampak lingkungan dalam sistem pangan. Sebagian besar nitrogen yang dihasilkan oleh manusia digunakan sebagai pupuk dalam pertanian. Oleh karena itu, mengelola pupuk dengan optimal untuk mencapai hasil panen yang tinggi dengan efisiensi nitrogen yang tinggi merupakan bagian kunci dari ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan. Indikator ini adalah rasio antara jumlah nitrogen dalam tanaman yang dipanen dengan jumlah nitrogen yang diterapkan sebagai pupuk per musim tanam atau tahun. Ini mencerminkan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen di lahan pertanian, yang dipengaruhi oleh teknologi baru dan program pengelolaan yang diterapkan oleh petani dan penasihat pertanian. Target efisiensi penggunaan nitrogen bergantung pada berbagai faktor seperti iklim, hasil panen, kondisi tanah, irigasi, dan praktik pengelolaan lainnya. Indikator ini harus dilihat bersama dengan indikator lain yang terkait, seperti hasil panen dan produktivitas air. Salah satu target yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen sebesar 30 persen dari tingkat saat ini di negara-negara yang masih jauh di bawah tingkat yang dapat dicapai dengan manajemen yang baik dan penggunaan sumber daya yang tepat. Kerjasama antara organisasi internasional, regional, industri pupuk, dan komunitas ilmiah diperlukan untuk meningkatkan indikator ini. Perbaikan dalam pengumpulan data diperlukan melalui statistik tahunan tentang penggunaan unsur hara dan pemulangan tanaman di tingkat subnasional serta melalui pemantauan lapangan reguler tentang efisiensi

penggunaan nitrogen dan indikator lain yang terkait dengan nutrisi tanaman.

7) Kerugian besar akibat nitrogen reaktif dan fosfor terhadap lingkungan

Pupuk nitrogen dan fosfor memiliki peran vital dalam sistem pertanian untuk mendukung populasi global. Mereka memungkinkan pertanian yang intensif, yang pada gilirannya membantu mencegah konversi lahan menjadi pertanian. Namun, penggunaan yang berlebihan atau kurang dari kedua zat tersebut dapat menyebabkan masalah serius. Beberapa daerah, terutama di Sub-Sahara Afrika, mengalami kekurangan nitrogen dan fosfor dalam tanah mereka, sementara negara lain menghadapi masalah kelebihan, terutama dari pertanian, peternakan, limbah, dan aktivitas lainnya. Kelebihan nitrogen dapat mengganggu ekosistem, terutama di perairan, dengan dampak regional dan global. Oleh karena itu, tindakan internasional diperlukan untuk mendorong praktik pengelolaan yang baik tanpa mengurangi produktivitas pertanian. Salah satu pendekatan utama adalah menggunakan indikator untuk mengukur penggunaan zat hara tanaman secara efektif dan efisien, serta untuk memantau beban nutrisi berlebih yang dapat merusak fungsi ekosistem.

8) Akses terhadap fasilitas pengeringan, penyimpanan dan pengolahan

Pentingnya infrastruktur pengeringan dan penyimpanan hasil pertanian tak bisa diabaikan, karena dapat mengurangi kerugian akibat kontaminasi maupun serangga, serta memungkinkan petani untuk memiliki lebih banyak waktu dalam menjual hasil panen mereka dengan menunggu harga yang optimal. Memperluas fasilitas pengolahan di pedesaan tidak hanya menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga meningkatkan akses ke pasar dan memberikan nilai tambah, seperti produksi makanan untuk meningkatkan gizi anak serta mengurangi beban kerja ibu. Dengan demikian, diperlukan indikator untuk mengukur aksesibilitas terhadap fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan ini.

9) Perubahan tahunan lahan rusak atau yang menjadi gurun

FAO mendefinisikan degradasi lahan sebagai penurunan kondisi tanah yang mempengaruhi kemampuannya dalam menyediakan barang

dan layanan ekosistem serta menjaga fungsi-fungsinya dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan degradasi lahan meliputi salinisasi, erosi, kehilangan nutrisi tanah, dan penggurunan pasir. Perkembangan teknologi seperti penginderaan jauh, pemetaan digital, dan sistem pemantauan terus meningkatkan kualitas data terkait degradasi lahan. Tujuan utamanya adalah menghentikan semua bentuk degradasi lahan pada tahun 2030.

Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau kejadian degradasi dan desertifikasi tanah adalah melalui luas lahan yang mengalami kondisi kritis. Desertifikasi merupakan salah satu proses yang dapat menyebabkan degradasi lahan. Konsep lahan kritis mengacu pada area yang telah mengalami kerusakan parah karena kehilangan tutupan vegetasi, sehingga mengurangi atau menghilangkan kemampuannya dalam menahan air, mengendalikan erosi, mengatur siklus nutrisi, mengatur iklim mikro, dan menyimpan karbon. Kondisi lahan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekritisan menjadi sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan normal, berdasarkan kondisi vegetasinya. Data tentang lahan kritis diperoleh dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut), yang mulai tersedia sejak tahun 2000 dan telah diperbarui pada tahun 2006, 2010, dan 2011. Data tersebut dapat diuraikan berdasarkan wilayah provinsi dan tingkat kekritisan lahan, seperti agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Namun, pengumpulan data tentang lahan kritis tidak dilakukan secara rutin setiap tahun, sehingga sulit untuk mendeteksi perubahan tahunan.

10) Produktivitas air tanaman (hasil panen (ton) per satuan air irigasi (m3))/perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan jumlah air yang diberikan terhadap tanaman

Indikator yang ini berkaitan secara langsung dengan penggunaan air tawar dalam irigasi pertanian. Dalam kerangka Sistem Neraca Ekonomi-Lingkungan (SEEA), produktivitas air diukur sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dibagi dengan volume air yang digunakan oleh sektor tersebut. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk merumuskan definisi dan penggunaan indikator ini.

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia

1) Angka kematian neonatal, bayi, dan balita

Angka kematian balita adalah persentase kemungkinan bagi seorang anak untuk meninggal sebelum mencapai usia lima tahun, jika merujuk pada tingkat kematian yang terjadi pada saat ini. Indikator ini memberikan gambaran tentang kesehatan dan kelangsungan hidup anakanak dan diungkapkan sebagai jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup. Lebih dari 90% kematian global di kalangan anak-anak di bawah usia 5 tahun dapat dijelaskan melalui indikator ini. Karena seringkali tidak tersedia data tentang kejadian penyakit, data angka kematian sering digunakan sebagai gantinya.

2) Rasio dan angka kematian ibu

Rasio kematian ibu adalah ukuran jumlah kematian ibu per tahun disebabkan oleh terkait dengan kehamilan atau yang atau penanganannya, dalam 42 hari setelah terminasi kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini mencerminkan kemampuan sistem kesehatan untuk mencegah dan mengatasi komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan. Selain itu, indikator ini juga menggambarkan kondisi kurangnya gizi dan kesehatan perempuan secara umum, serta menyoroti isu ketidakpenuhan hak reproduksi yang dapat menyebabkan kehamilan yang berisiko dan berulang. Tingkat kematian ibu, di sisi lain, adalah perbandingan antara jumlah kematian ibu dalam suatu populasi dengan jumlah wanita usia reproduksi dalam populasi tersebut. Ini mencakup kemungkinan hamil dan kemudian meninggal selama kehamilan atau dalam enam minggu setelah melahirkan. Di Indonesia, indikator yang terkenal untuk mengukur kematian ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI), yang dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup. Data tentang AKI dapat diproyeksikan setiap tahun hingga tingkat provinsi. Data AKI dapat dipecah lebih lanjut berdasarkan faktor-faktor seperti usia, wilayah (perkotaan dan pedesaan), dan tingkat pendapatan.

3) Prevalensi, angka pengobatan dan angka kematian HIV

Indikator ini mengukur proporsi individu dalam kelompok usia tertentu yang hidup dengan HIV, dinyatakan sebagai persentase dari total populasi dalam kelompok usia tersebut, serta tingkat pengobatan dengan terapi anti-retroviral (ART) dalam kelompok usia yang sama. Indikator ini mencerminkan kemajuan dalam menurunkan tingkat infeksi HIV dan meningkatkan akses terhadap pengobatan. Tingkat pengobatan mengacu pada persentase populasi dalam kelompok usia tertentu yang terinfeksi HIV dan sedang menjalani terapi antiretroviral (ARV), yang meliputi penggunaan minimal tiga obat ARV untuk menekan HIV dan menghentikan perkembangan penyakit. Selain itu, indikator ini juga memberikan gambaran tentang kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS.

Prevalensi kasus HIV/AIDS dihitung berdasarkan data kasus baru dan kasus kumulatif HIV/AIDS. Data perkembangan kasus AIDS ini dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia setiap tahun. Indikator ini dapat dibagi berdasarkan usia dan jenis kelamin penderita HIV/AIDS, dan tersedia tingkat kabupaten/kota. Prevalensi juga hingga dapat dipecah berdasarkan kelompok penduduk yang berisiko tinggi melalui survei STBP. Indikator yang menggambarkan perkembangan pengobatan HIV/AIDS yang tersedia di Indonesia adalah proporsi penduduk yang terinfeksi HIV dan memiliki akses pada obat antiretroviral (ARV). Data dikumpulkan oleh Kemenkes dari berbagai fasilitas kesehatan setiap tahun dan dapat diuraikan berdasarkan jenis terapi ARV (ART lini 1 dan lini 2), wilayah (kabupaten/kota), usia, dan jenis kelamin. Data kematian AIDS dilaporkan dari berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia setiap tahun, dan dapat dibagi berdasarkan usia dan jenis kelamin penderita HIV/AIDS hingga tingkat kabupaten/kota.

4) Insiden, prevalensi, dan angka kematian terkait TBC

Angka kejadian TB adalah jumlah kasus TB baru yang terjadi per 100.000 orang dalam setahun. Prevalensi mengacu pada jumlah kasus TB dalam populasi pada titik waktu tertentu per 100.000 orang. Sedangkan angka kematian TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB per 100.000 orang dalam setahun. Mendeteksi dan menyembuhkan TB merupakan langkah penting dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Meskipun prevalensi dan angka kematian memberikan gambaran yang lebih sensitif tentang beban TB, data insiden TB memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak

upaya penanggulangan TB di seluruh dunia. Data untuk indikator TB tersebut diperoleh dari laporan TB Global yang disusun oleh WHO setiap tahun, dengan estimasi berdasarkan laporan kasus TB dari negara-negara anggota. Data ini juga mencakup informasi tentang kasus TB yang terkait dengan HIV. Prevalensi TB Paru juga dapat diperoleh dari Riskesdas, dengan data tersedia hingga tingkat provinsi dan dapat dipecah berdasarkan berbagai karakteristik penderita seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kasus TB, terdapat indikator seperti proporsi pasien TB Paru yang positif tes bakteri, angka penemuan kasus TB Paru yang positif tes bakteri, dan tingkat keberhasilan pengobatan, yang dikumpulkan oleh Kemenkes hingga tingkat kabupaten/kota, meskipun tidak selalu tersedia secara lengkap untuk semua karakteristik penderita.

Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua

1) Persentase anak yang menerima setidaknya satu tahun dari program pendidikan usia dini (PAUD) yang berkualitas

Indikator ini mengukur persentase anak-anak usia 36-59 bulan yang terdaftar dalam program pendidikan anak usia dini. Program tersebut mencakup berbagai jenis, mulai dari perawatan pribadi atau berkelompok hingga program formal pra-sekolah. Pentingnya indikator ini terletak pada pemantauan perkembangan anak-anak, karena partisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang berkualitas tinggi memiliki dampak positif yang konsisten dan berkelanjutan pada perkembangan mereka. Di tingkat pendek, pendidikan anak usia dini berkontribusi positif terhadap keterampilan awal seperti membaca dan matematika. Di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah, akses yang baik ke pendidikan pra-sekolah meningkatkan angka kehadiran siswa di sekolah dasar. Manfaat jangka panjang dari pendidikan pra-sekolah yang berkualitas tinggi meliputi peningkatan prestasi akademik, penurunan angka kejahatan, pengurangan kehamilan remaja, dan peningkatan pendapatan di kemudian hari.

Program pendidikan anak usia dini, baik yang berskala kecil maupun besar, memberikan rasio manfaat dan biaya yang menguntungkan.

Meskipun demikian, manfaatnya cenderung lebih besar bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Di Indonesia, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyasar anak-anak usia 0-6 tahun, mengingat usia masuk sekolah dasar yang dimulai pada usia 7 tahun. Data untuk indikator ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencatat apakah anggota rumah tangga memiliki anak usia 0-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti program pendidikan pra-sekolah. Program pra-sekolah yang dimaksud mencakup berbagai jenis, seperti TK/BA/RA, kelompok bermain, taman penitipan anak, PAUD terintegrasi BKB/Posyandu, dan lembaga lainnya. Data ini dapat dianalisis berdasarkan usia anak, jenis kelamin, lokasi geografis, dan pendapatan rumah tangga.

2) Angka kelulusan Pendidikan Dasar untuk anak perempuan dan anak laki-laki

Indikator ini mengukur proporsi anak-anak yang memulai dan menyelesaikan pendidikan dasar sejak kelas 1. Penyelesaian pendidikan dasar diukur dengan persentase pendatang baru di kelas akhir pendidikan dasar tanpa memperhatikan usia mereka, yang dinyatakan sebagai persentase dari jumlah penduduk pada usia yang cocok untuk kelas terakhir sekolah dasar (Gross Intake Ratio to Last Grade of Primary School). Pendidikan dasar, seperti yang ditetapkan oleh ISCED97, melibatkan program-program yang memberikan dasar-dasar pendidikan, termasuk membaca, menulis, matematika, serta pemahaman dasar dalam mata pelajaran seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni, dan musik. Rasio Masukan Kasar di kelas terakhir SD berasal dari laporan-laporan utama yang mencakup akses ke kelas terakhir pada masa lalu serta kebijakan pendidikan masa lalu. Indikator ini mencerminkan pertama kalinya siswa menyelesaikan pendidikan dasar, tidak termasuk siswa yang mengulang kelas terakhir. Rasio Masukan Kasar yang tinggi menunjukkan tingkat penyelesaian pendidikan dasar yang tinggi. Karena perhitungannya mencakup semua pendatang baru di kelas terakhir (tanpa memperhatikan usia), Rasio Masukan Kasar bisa melebihi 100 persen karena dapat mencakup siswa yang lebih muda atau lebih tua yang masuk ke kelas terakhir sekolah dasar untuk pertama kalinya.

3) Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki

Indikator ini mengukur persentase anak perempuan dan laki-laki yang melanjutkan ke kelas pertama sekolah menengah setelah menvelesaikan pendidikan dasar. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah siswa yang melanjutkan ke sekolah menengah dari kelas akhir sekolah dasar dengan jumlah total siswa yang seharusnya lulus dari sekolah dasar. Tujuan indikator ini adalah untuk memantau tingkat putus sekolah selama pendidikan dasar dan transisi ke sekolah menengah dengan memperhitungkan jumlah siswa yang seharusnya lulus. Angka kelulusan sekolah menengah penting karena tingkat putus sekolah cenderung tinggi pada tahap ini, dimana biaya pendidikan meningkat dan sistem pendidikan masih berupaya meningkatkan kualitasnya. Selain itu, perbedaan gender memainkan peran penting, karena keinginan anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan biaya pendidikan yang berbeda anak laki-laki. Banyak rumah tangga masih menginvestasikan pendidikan anak perempuan karena anggapan bahwa keuntungan ekonomi tidak sebanding dan tidak langsung. Paradigma masyarakat yang masih menempatkan peran anak perempuan secara tradisional sebagai calon istri dan ibu juga mempengaruhi keputusan terkait pendidikan mereka.

4) Angka partisipasi perguruan tinggi bagi perempuan dan laki-laki

Indikator ini mengukur total pendaftaran di perguruan tinggi tanpa memandang usia, dinyatakan sebagai persentase dari total penduduk dalam kelompok usia yang telah menyelesaikan pendidikan menengah. Pendidikan tinggi, sebagaimana ditetapkan oleh Klasifikasi Baku Pendidikan Internasional (1997), mencakup tingkat 5 dan 6. Tingkat partisipasi perguruan tinggi mencerminkan kualitas angkatan kerja suatu negara, dan kesenjangan besar antara tingkat partisipasi perguruan tinggi dan tingkat pengangguran dapat mengindikasikan masalah ekonomi dalam menyerap lulusan terlatih atau kesenjangan dalam keterampilan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan

1) Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan moral dan sosial masyarakat, tetapi juga membatasi kebebasan dan pilihan hidup mereka karena ancaman kekerasan domestik yang dapat terjadi di rumah. Global Burden of Disease mencatat bahwa lebih dari 30 persen perempuan di atas usia 15 tahun telah mengalami pelecehan fisik atau seksual dari pasangan mereka selama hidup mereka. Memahami insiden dan prevalensi kekerasan merupakan langkah awal untuk merancang kebijakan pencegahan yang efektif. Indikator ini fokus pada kejadian kekerasan fisik dan/atau seksual serta ancaman kekerasan terhadap perempuan, karena kebanyakan kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh pasangan intim. Pengukuran dilakukan dengan melihat kejadian dalam periode 12 bulan terakhir, karena dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perubahan tingkat dan risiko kekerasan dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan pengukuran seumur hidup.

Saat ini, data prevalensi kekerasan dikumpulkan oleh BPS menggunakan pendekatan persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan, namun pendekatan tersebut kurang rinci dan tidak cukup tepat untuk indikator ini. Survei ad-hoc yang dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih mendetail adalah Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh BPS bersama Kementerian PPA. Survei ini melibatkan semua perempuan yang berusia 18 tahun ke atas atau perempuan di bawah 18 tahun yang pernah menikah sebagai responden. Hasil survei dapat memberikan data secara nasional maupun provinsi, dan dapat membedakan kekerasan berdasarkan usia, status perkawinan, wilayah, dan jenis tindakan kekerasan yang dialami, seperti kekerasan verbal, fisik, penelantaran, seksual, dan lainnya.

2) Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun

Indikator ini mengukur prevalensi pernikahan dini sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh UNICEF. Pernikahan dini dianggap

sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat mengakibatkan dampak yang berlangsung seumur hidup. Penelitian menunjukkan bahwa banyak anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung meninggalkan pendidikan formal dan memiliki risiko kehamilan yang tinggi. Selain itu, pengantin perempuan tersebut berisiko mengalami pelecehan, eksploitasi, dan pemisahan dari keluarga dan teman-teman, yang dapat berdampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

3) Persentase kursi yang diduduki perempuan dan minoritas di parlemen nasional dan/ atau daerah

Indikator ini adalah modifikasi dari Indikator MDGs yang bertujuan untuk mengukur proporsi kursi di badan legislatif (tingkat nasional, regional, lokal) vang diisi oleh perempuan dan anggota dari kelompok minoritas, termasuk masyarakat adat, yang kemudian dibandingkan dengan populasi masing-masing kelompok. Kelompok minoritas yang dimaksud adalah kelompok dengan jumlah yang lebih sedikit daripada seluruh populasi suatu negara, yang berada dalam posisi non-dominan dan memiliki karakteristik etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk. Partisipasi ini mencerminkan sejauh mana perempuan dan kelompok minoritas memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan politik formal. Keterlibatan mereka dalam jabatan terpilih adalah faktor penting dalam memberdayakan perempuan dan kelompok minoritas dalam kehidupan politik dan publik, dan dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam dinamika politik serta membawa dampak positif bagi perempuan dan kelompok minoritas tersebut.

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi secara Berkelanjutan

1) Persentase penduduk yang menggunakan air minum dasar, menurut daerah perkotaan/pedesaan

Indikator ini mengukur persentase penduduk di perkotaan dan pedesaan yang memiliki akses ke layanan dasar air minum, sebagaimana dijelaskan dalam Program Monitoring Gabungan WHO/UNICEF. Air minum yang dianggap layak adalah yang digunakan untuk konsumsi,

persiapan makanan, dan kebutuhan dasar kebersihan, dengan rumah tangga dianggap memiliki akses layanan dasar tersebut jika mereka dapat mengakses sumber air yang memadai dalam waktu 30 menit atau kurang untuk satu putaran, termasuk antrian. Sumber air minum yang layak adalah yang terlindung dari kontaminasi, seperti pipa pasokan air minum lokal, kran umum, sumur galian, mata air terlindung, air hujan, dan air minum kemasan. Kekurangan akses terhadap air minum yang aman adalah penyebab utama penyakit dan kematian karena infeksi virus, polusi kimia, dan kebersihan yang buruk. Indikator ini memberikan gambaran mengenai paparan penduduk terhadap akses air minum yang aman dan langkah-langkah efektif untuk mengaksesnya.

BPS menyediakan indikator akses air minum layak berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Air minum yang dianggap layak meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, penampungan air hujan, mata air, sumur terlindung, sumur bor, atau sumur pompa, dengan jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan tempat pembuangan sampah. Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan ke air minum layak, dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum berkualitas dengan total rumah tangga, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator dapat dipecahkan berdasarkan wilayah tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan).

2) Persentase pengolahan aliran air limbah sesuai standar nasional, menurut sumber rumah tangga dan industri

Kurangnya pengelolaan limbah domestik dan industri merupakan masalah serius yang menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan di banyak kota, terutama di negara sedang berkembang di mana sekitar 80-90 persen limbah perkotaan tidak dikelola dengan baik. Bahkan di negara maju, masalah penanganan limbah masih belum terselesaikan sepenuhnya. Pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi menyebabkan volume limbah global terus meningkat secara signifikan. Limbah yang tidak ditangani dengan baik seringkali langsung dibuang ke sumber air, mengancam kesehatan manusia, ekosistem, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber air. Oleh karena itu, indikator ini diajukan untuk memantau penanganan limbah pasca-2015.

Limbah dapat didefinisikan sebagai kombinasi limbah domestik seperti air hitam (kotoran, urin, lumpur tinja) dan air abu-abu (limbah dapur dan kamar mandi), limbah dari perusahaan dan institusi komersial termasuk rumah sakit, limbah industri, air hujan, dan limbah kota lainnya, serta limbah pertanian, hortikultura, dan budidaya.

Penanganan limbah melibatkan proses pemisahan limbah terkontaminasi secara fisik, kimia, dan biologis untuk menghasilkan air yang aman untuk dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali, serta lumpur padat yang dapat dibuang atau digunakan kembali, misalnya sebagai pupuk. Penggunaan teknologi tinggi memungkinkan pengolahan limbah sehingga air yang telah diolah dapat digunakan kembali untuk pertanian, industri, atau air minum. Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk menyajikan data terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri atau instansi komersial, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, data mengenai pengelolaan limbah masih terbatas, sehingga diperlukan data yang komprehensif dan tersedia secara nasional maupun regional sebagai bagian dari upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan 7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern

1) Proporsi penduduk dengan akses terhadap solusi memasak modern, menurut daerah perkotaan/pedesaan

Indikator ini mengukur persentase penduduk yang menggunakan bahan bakar fosil non-solid untuk keperluan memasak, sebagaimana didefinisikan dalam kerangka kerja Sustainable Energy for All (SE4All). Meskipun data yang tersedia saat ini cenderung hanya melacak akses secara biner (apakah rumah tangga memiliki akses atau tidak), SE4All berupaya untuk mengembangkan definisi yang lebih komprehensif untuk melacak akses solusi memasak modern. Definisi tersebut akan mempertimbangkan peran dari penggunaan kompor masak, karena hal ini memengaruhi efisiensi, polusi, dan keamanan dalam kegiatan memasak di rumah tangga.

SE4All berencana untuk menggunakan matriks berlapis yang mencakup performa solusi memasak utama (termasuk bahan bakar dan kompor masak), serta menilai sejauh mana solusi tersebut cocok dengan kebutuhan dan kebiasaan sehari-hari rumah tangga. Matriks ini juga akan mempertimbangkan polusi udara dalam ruangan, ventilasi, dan penggunaan minyak tanah untuk memasak dan pencahayaan. Pengukuran akses solusi memasak modern diharapkan meningkatkan kesehatan rumah tangga miskin, terutama perempuan dan anak perempuan yang sering bertanggung jawab dalam kegiatan dapur.

Data yang disediakan oleh Susenas mencakup informasi mengenai sumber penerangan utama rumah tangga, termasuk listrik PLN, listrik non-PLN, petromak/aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Akses listrik yang dapat diandalkan dapat diukur dengan memperhitungkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN atau listrik non-PLN sebagai sumber penerangan utama. Data ini dapat dianalisis berdasarkan wilayah (perkotaan dan pedesaan) serta jenis kelamin Kepala Rumah Tangga.

2) Insentif implisit untuk energi rendah karbon pada sektor listrik

Untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) ke level optimal secara sosial, diperlukan penerapan biaya sosial emisi GRK, yang memerlukan kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga karbon dalam rentang tertentu. Indikator ini mengukur tingkat harga karbon (dinyatakan dalam \$/tCO2e) yang efektif di sektor listrik, sebagaimana didefinisikan oleh laporan OECD tentang harga karbon yang efektif. Harga karbon ini merupakan biaya bersih bagi masyarakat untuk setiap unit pengurangan emisi GRK yang diinduksi.

Harga karbon dapat bersifat eksplisit, seperti pajak karbon atau harga tunjangan emisi dalam sistem perdagangan emisi GRK, atau dapat bersifat implisit, yaitu harga karbon yang tercermin dalam biaya bagi masyarakat per ton CO2e yang berkurang sebagai akibat dari setiap jenis tindakan kebijakan yang memengaruhi emisi GRK. Perbandingan harga karbon efektif berdasarkan kebijakan pada sektor dan negara yang berbeda memberikan pemahaman mengenai insentif untuk mengurangi emisi dan efektivitas biaya dari kebijakan alternatif untuk mengurangi emisi, serta dampaknya terhadap daya saing.

SDSN mengusulkan bahwa sebagai titik awal, kerangka pasca-2015 dapat melacak harga karbon yang efektif untuk pembangkit listrik. Indikator ini mencakup sebagian besar emisi GRK dan lebih mudah ditelusuri secara metodologis karena teknologi yang relevan bersifat global, emisi dan kebijakan terkonsentrasi, serta informasi yang tersedia dapat dibandingkan antarnegara, internasional, dan organisasi lainnya.

Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja Yang Optimal Dan Produktif, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

1) Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) adalah ukuran total pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu negara, yang diukur berdasarkan biaya hidup relatif di masing-masing negara menggunakan paritas daya beli (PPP). PNB ini mencakup nilai tambah oleh semua produsen dalam negeri, ditambah dengan pajak netto setelah dikurangi subsidi, serta penerimaan bersih dari penghasilan utama (seperti kompensasi karyawan dan pendapatan properti) dari luar negeri.

Program Perbandingan Internasional (International Comparison Program, ICP) dapat digunakan untuk menghitung paritas daya beli (PPP), yang memungkinkan perbandingan yang akurat antara pendapatan dan harga barang di berbagai negara. Metode Atlas, yang digunakan oleh Bank Dunia, adalah salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan nilai tukar yang stabil untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar lintas negara terhadap perhitungan pendapatan nasional.

2) Laporan dan implementasi Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan

Pada tahun 2012, Komisi Statistik PBB mengadopsi Sistem Neraca Ekonomi Lingkungan (SEEA) sebagai standar internasional pertama untuk neraca ekonomi lingkungan. SEEA mengintegrasikan statistik lingkungan ke dalam statistik resmi dan memperluas cakupan Sistem Neraca Nasional (SNN), yang biasanya berfokus pada pengukuran kinerja ekonomi. SEEA menyediakan informasi tentang tren penggunaan sumber daya alam, tingkat emisi dan pembuangan ke lingkungan dari kegiatan ekonomi, serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan. Komisi Statistik PBB sedang mengembangkan templat

pelaporan untuk kerangka kerja sentral SEEA. Indikator ini mengevaluasi apakah suatu negara menerapkan dan melaporkan SEEA nasional, memperhitungkan bahwa beberapa aspek SEEA mungkin tidak relevan untuk beberapa negara, dan implementasinya dilakukan secara bertahap tergantung pada prioritas kebijakan.

3) Ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktek

Konvensi ILO memaparkan standar utama perburuhan yang bertujuan untuk mempromosikan peluang kerja yang layak dan produktif, di mana pria dan wanita dapat bekerja dalam kondisi yang sama, tanpa diskriminasi, aman, bebas, dan bermartabat. Indikator yang diusulkan mengikuti ratifikasi dan kepatuhan negara terhadap 8 konvensi fundamental ILO. Konvensi-konvensi ini mencakup kebebasan berserikat dan pengakuan hak untuk berunding bersama, penghapusan kerja paksa atau wajib, menetapkan usia minimum untuk tenaga kerja dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, serta penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk pemberian upah yang setara. Negara-negara diharuskan untuk secara berkala melaporkan ratifikasi konvensi yang dilakukan setiap dua tahun. Proses pelaporan didukung oleh sistem pengawasan untuk memastikan implementasi. ILO secara rutin mengevaluasi penerapan standar di negara-negara anggota dan memberikan rekomendasi.

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi

1) Akses terhadap jalan untuk segala cuaca

Akses yang dapat diandalkan dan dapat dilalui sepanjang tahun sangat penting bagi perkembangan pedesaan, termasuk akses ke sumber daya, pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Indikator ini menunjukkan persentase penduduk yang memiliki akses ke jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun dalam jarak tertentu (x km) dari tempat tinggal mereka. Idealnya, jalan tersebut harus diaspal untuk memastikan akses kendaraan berat.

Saat ini, belum ada data yang tersedia mengenai penduduk yang memiliki akses ke jalan all weather road dalam jarak x km. Pendekatan

sebelumnya menggunakan data dari PODES untuk mengetahui penduduk yang memiliki akses ke jalan, dengan asumsi bahwa jalan yang diidentifikasi dalam PODES adalah jalan untuk segala musim (all season road), karena jenis jalan tidak dijelaskan secara rinci dalam pendataan tersebut. Namun, keterbatasan data ini menimbulkan tantangan dalam memberikan informasi yang lebih detail mengenai akses penduduk desa terhadap infrastruktur jalan, khususnya jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun (all weather road), seperti jalan aspal dalam kondisi baik atau sedang. Akses ini sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan meningkatkan pembangunan di pedesaan.

2) Mempercepat adopsi teknologi baru untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indeks yang akan dikembangkan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh negara. Indeks ini memperhitungkan tiga dimensi utama kinerja TIK, termasuk kecepatan unduhan rata-rata broadband tetap, proporsi pengukuran kecepatan unduhan broadband pada perangkat seluler, dan kapasitas bandwidth internasional yang terhubung ke wilayah metropolitan. Setiap komponen indeks dan indeks secara keseluruhan dapat dinormalisasi dalam rentang nilai antara 1 hingga 100.

3) Menciptakan lapangan kerja di sektor industri yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor industri terhadap PDB secara berkelanjutan

Indikator ini mengevaluasi kontribusi sektor industri terhadap ekonomi suatu negara. Industri manufaktur secara umum didefinisikan sebagai proses mengubah bahan fisik atau kimia menjadi produk baru, tidak peduli prosesnya (dengan mesin atau manual), lokasinya (pabrik atau rumah), atau cara penjualannya (grosir atau eceran). Nilai tambah, yang dihitung berdasarkan International Standard Industrial Classification (ISIC) revisi 3, adalah hasil bersih dari sektor manufaktur setelah semua output ditambahkan dan input dikurangi, tanpa memperhitungkan depresiasi aset fabrikasi atau penurunan sumber daya alam. Indikator ini dimasukkan sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Tujuan 10. Mengurangi Ketimpangan Dalam dan Antar Negara

1) Ketimpangan pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan: proporsi pendapatan nasional bruto dari 10 persen penduduk terkaya atau rasio Palma

Ketika mempertimbangkan ketimpangan, fokus sering kali tertuju pada rentang antara pendapatan teratas dan terbawah dalam distribusi pendapatan. Indikator ini bertujuan untuk memantau perubahan di segmen atas distribusi pendapatan, yang berbeda dari indikator kemiskinan relatif yang lebih fokus pada bagian bawah distribusi. SDSN mengusulkan dua opsi untuk indikator ini: negara-negara dapat memantau kontribusi 10 persen penduduk terkaya terhadap total pendapatan nasional, atau menggunakan Rasio Palma. Rasio Palma mengukur perbandingan antara kontribusi pendapatan 10 persen terkaya dengan 40 persen penduduk terbawah dari populasi. Ini bertujuan untuk mengatasi beberapa keterbatasan koefisien Gini, yang tidak sensitif terhadap perubahan dalam struktur demografi atau distribusi pendapatan di ekor atas dan bawah.

Penggunaan Rasio Palma, yang lebih sederhana daripada koefisien Gini, dapat lebih mudah dimengerti oleh pembuat kebijakan dan masyarakat. Misalnya, jika nilai Rasio Palma tinggi, ini menunjukkan perlunya upaya untuk mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan pendapatan bagi 40 persen penduduk termiskin, atau dengan mengurangi pendapatan bagi 10 persen penduduk terkaya. Untuk menghitung ketimpangan pendapatan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, perhitungan menggunakan Rasio Palma belum dilakukan, dan perbaikan kualitas pengumpulan data menjadi penting agar indikator dapat dihitung menggunakan data pendapatan langsung. Data tersebut dapat disajikan berdasarkan desil atau persentil, serta menurut wilayah geografis.

Tujuan 11. Membuat Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

1) Persentase peduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh atau pemukiman informal

Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang tinggal di daerah kumuh di kota, dinyatakan sebagai persentase dari total populasi kota. Di tingkat nasional, persentase tersebut dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh di semua kota dengan total penduduk kota di negara tersebut. UN-Habitat telah merumuskan definisi rumah tangga kumuh untuk digunakan dalam survei atau sensus rumah tangga guna mengidentifikasi penghuni kawasan kumuh di perkotaan. Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai kelompok individu yang tinggal di bawah satu atap di daerah perkotaan yang tidak memenuhi standar tertentu, seperti rumah yang kokoh, ruang huni yang memadai, akses air bersih yang cukup, sanitasi yang memadai, dan kepemilikan tempat tinggal yang aman.

2) Memastikan akses universal yang aman dan layak ke lingkungan dan layanan dasar perkotaan termasuk perumahan, sanitasi dan pengelolaan limbah dan transportasi yang rendah karbon

Indikator yang direncanakan terdiri dari dua aspek, yaitu persentase penduduk perkotaan yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan persentase yang tidak takut akan penggusuran tanpa alasan yang jelas. Kedua aspek ini penting untuk memahami jaminan kepemilikan tanah secara menyeluruh. Meskipun bukti kepemilikan tanah dianggap penting, pengukuran juga mempertimbangkan persepsi penduduk, karena memberikan wawasan tambahan yang berharga. Pengukuran persepsi dapat memberikan pembandingan yang lebih berguna di antara negaranegara.

Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

1) Menjamin kerugian makanan yang rendah dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap lapisan atmosfer

Data tentang kerugian dan sisa makanan tersebar di seluruh dunia, tetapi sulit untuk dibandingkan karena kurangnya konsistensi dalam pengukuran. Untuk mengatasi masalah ini, FAO sedang mengembangkan indikator global tentang kerugian pangan. Indikator ini menggunakan model berbasis variabel seperti kepadatan jalan dan faktor cuaca untuk memperkirakan kerugian secara kuantitatif. Data untuk model ini berasal dari berbagai sumber seperti statistik nasional, FAOSTAT, dan indeks logistik WFP. Selain indikator global, negaranegara juga dapat mengadopsi indikator lain sesuai dengan prioritas dan sistem pemantauan mereka sendiri.

2) Menjamin pemerintahan dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan, terpadu dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs

Saat ini, mayoritas perusahaan hanya fokus pada pelaporan keuangan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Akibatnya, investor mungkin tidak menyadari risiko yang muncul dari proses produksi perusahaan, dan masyarakat juga tidak mengetahui kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Berbagai standar pelaporan terpadu telah dikembangkan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Salah satu contoh yang penting adalah International Integrated Reporting Council (IIRC). SDSN mengusulkan indikator untuk melacak persentase perusahaan besar (dengan pendapatan lebih dari US\$ 1 miliar dalam PPP) yang menyusun laporan terpadu vang seialan dengan Tuiuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya

1) Ketersediaan dan implementasi strategi dekarbonisasi yang transparan dan rinci, konsisten dengan anggaran karbon global 2oC atau lebih rendah dan dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030 dan 2050

Untuk menjaga pemanasan global di bawah 2°C atau lebih rendah, setiap negara perlu merancang strategi dekarbonisasi nasional untuk tahun 2050. Strategi ini harus mencakup semua sumber emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk energi, industri, pertanian, hutan, transportasi, bangunan, dan sektor lainnya. Pentingnya strategi ini terletak pada

transparansi dan detail mengenai rencana negara-negara untuk mengurangi emisi, seperti pengurangan konsumsi energi, peningkatan efisiensi energi, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan emisi dari sektor listrik. Selain itu, strategi ini harus menetapkan target pengurangan emisi GRK pada tahun-tahun tertentu, seperti 2020, 2030, dan 2050. Indikator ini juga bertujuan untuk mengukur seberapa jauh implementasi strategi tersebut telah dilakukan.

2) Mengurangi emisi gas rumah kaca yang tidak berhubungan dengan energi melalui praktik perbaikan di bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sampah dan industri

Indikator ini mengukur jumlah total emisi bersih gas rumah kaca (GRK) dalam ton CO2 ekuivalen di sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya. Emisi ini dibedakan berdasarkan jenis gas (CO2, N2O, dan CH4) serta jenis lahan yang digunakan (misalnya lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan lahan lainnya), mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) 2006 untuk inventarisasi GRK nasional, dan Panduan Praktik Baik untuk Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan, dan Kehutanan (GPG-LULUCF). Metode inventarisasi ini harus praktis dan dapat diterapkan secara operasional. Untuk sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya, emisi GRK yang berasal dari aktivitas manusia dan pembuangan melalui limbah dihitung untuk lahan yang telah mengalami intervensi manusia, seperti untuk meningkatkan produksi atau memperbaiki fungsi ekologi dan sosialnya. Sedangkan untuk lahan yang tidak mengalami intervensi manusia, tidak perlu dilaporkan emisi GRK-nya. Meskipun demikian, dianjurkan bagi negara untuk mengukur dan melacak luas lahan yang tidak terkelola dari waktu ke waktu, sehingga konsistensi pelaporan terjaga dan perubahan penggunaan lahan terdokumentasi.

3) Menjamin investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

Mulai tahun 2020, negara-negara maju telah berkomitmen di Konferensi UNFCCC untuk menyediakan sekitar \$100 miliar setiap tahunnya untuk pendanaan iklim. Pentingnya pendanaan ini terletak pada perannya sebagai acuan untuk mengevaluasi ketercapaian target

keseluruhan pendanaan global sebesar setidaknya \$100 miliar per tahun oleh negara-negara maju.

Tujuan 14. Melestarikan Samudera, Laut, dan Sumber Daya Kelautan secara Berkelanjutan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Menjamin ekosistem kelautan yang aman, dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membayar biaya sosial akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut

Lautan, yang mencakup dua pertiga permukaan bumi dengan separuhnya terdiri dari laut lepas, memainkan peran vital dalam kesejahteraan manusia. SDSN mengusulkan penggunaan indeks komposit kesehatan laut untuk menilai kesehatan laut secara keseluruhan, yang mencakup 10 aspek ekosistem maritim dan manfaatnya bagi manusia. Indeks ini mengevaluasi aspek-aspek tersebut, seperti penyediaan makanan, peluang memancing, penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, pariwisata, ekonomi daerah pesisir, dan keanekaragaman hayati, melalui empat dimensi: status saat ini, tren saat ini, tekanan yang ada, dan ketangguhan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti polusi nutrisi dan keberadaan daerah perlindungan laut, indeks ini memberikan gambaran singkat tentang status laut dunia dan area pesisirnya.

Tujuan 15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

1) Menahan konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian

Indikator ini berguna untuk melacak perubahan neto dalam luas hutan dan ekspansi pertanian ke ekosistem alam, serta kerugian lahan pertanian produktif karena pertumbuhan perkotaan, industri, infrastruktur jalan, dan penggunaan lainnya, yang dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara. Tingkat perubahan ini diukur sebagai persentase per tahun. Pendekatan agroekologi yang berkelanjutan dapat meningkatkan produksi pangan tanpa mengorbankan ekosistem alam

untuk pertanian. Menurut FAO, lahan budidaya mencakup lahan yang digunakan untuk tanaman musiman, padang rumput sementara, lahan komersial, dan lahan sementara yang ditanami. Sementara itu, kawasan hutan mencakup tanah yang ditanami pohon, kecuali pohon yang ditanam dalam sistem pertanian seperti perkebunan atau agroforestri, serta pohon di kota dan taman.

2) Mengelola hutan secara berkelanjutan untuk mendukung Pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs

Indikator perubahan tahunan dalam kawasan hutan dan kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati memberikan informasi krusial tentang dinamika kawasan hutan dan upaya perlindungannya. Indikator terkait dengan hutan penting untuk memantau eksploitasi hutan dalam kegiatan ekonomi dan upaya lain yang berkelanjutan. Sebagai contoh, Global Forest Resources Assessment 2010 telah mengusulkan indikator persentase hutan yang dikelola secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat keberlanjutan pengelolaan hutan.

3) Berpartisipasi dan mendukung pengaturan regional dan global untuk menginventarisir, memantau dan melindungi jasa ekosistem darat

Red List Index (RLI) adalah sebuah indeks yang berguna untuk mengidentifikasi tingkat risiko kepunahan kelompok laut dan spesies darat dalam waktu dekat (10-50 tahun ke depan) jika tidak ada tindakan konservasi yang dilakukan. Penurunan nilai indeks ini menandakan peningkatan risiko kepunahan suatu spesies. RLI juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemajuan terhadap pencapaian target Aichi 12 dari Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). IUCN Red List merupakan sistem terkemuka dalam menentukan status ancaman spesies, menggunakan tujuh kategori risiko mulai dari "punah" hingga "kurang perhatian". Kriteria yang digunakan untuk menetapkan status risiko setiap spesies relatif mudah dipahami oleh masyarakat umum. Meskipun RLI telah dikembangkan untuk berbagai kelompok spesies utama seperti amfibi dan burung, masih terdapat kekurangan data, terutama untuk kelompok spesies utama seperti jamur.

Tujuan 16. Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan

1) Memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik

Indikator ini mengukur tingkat cedera dan kematian akibat kekerasan, termasuk serangan seperti pemukulan, pelecehan, dan pembakaran, serta kekerasan bersenjata, tetapi tidak mencakup kecelakaan atau cedera yang disebabkan oleh diri sendiri. Angka tersebut dinyatakan dalam unit per 100.000 penduduk. SDSN mendorong inklusi cedera dalam pengukuran ini karena ada banyak bentuk kekerasan yang tidak fatal.

2) Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu, manajemen sumber daya yang transparan, dan reformasi peraturan internasional untuk mencapai tujuan

Upaya untuk memerangi korupsi di sektor publik terus menjadi prioritas dalam pembangunan, pemberantasan kemiskinan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun mengukur korupsi bisa menjadi tantangan karena data yang tersedia cenderung tidak lengkap dan sulit untuk dibandingkan, Transparency International atau TI telah menciptakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat korupsi dalam administrasi dan politik suatu negara. IPK merupakan hasil kolaborasi berbagai lembaga terkemuka dan mencerminkan persepsi global tentang korupsi di berbagai negara.

Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

1) Mereformasi peraturan internasional untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan

Indikator MDG ini menggambarkan langkah yang diambil oleh negara-negara maju untuk mengurangi atau bahkan menghapus tarif, yang sering menjadi hambatan keuangan untuk impor, terutama dalam sektor-sektor vital seperti pertanian, tekstil, dan pakaian. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dengan mempermudah akses pasar bagi ekspor mereka.

2) Tersedianya laporan keuangan yang cukup dari domestik maupun internasional, termasuk kontribusi ODA terhadap pendapatan nasional sebanyak 0,7 persen untuk seluruh negara berpendapatan tinggi

Indikator ini menilai Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) bersama dengan sumbangan swasta yang bersih sebagai proporsi dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) negara-negara berpendapatan tinggi. Sasaran yang ditetapkan adalah mencapai nilai ODA setidaknya sebesar 0,7% dari PNB. Penentuan nilai ODA dan sumbangan swasta bersih ini menjadi bagian penting dalam evaluasi komitmen dan kontribusi negara-negara berpendapatan tinggi terhadap pembangunan global.

3) Memperkuat sarana dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas SDGs, manajemen dan pelaporan memerlukan kualitas data yang baik yang dilaporkan setiap tahun. Hal ini akan mengharuskan investasi yang substansial dalam meningkatkan alat-alat pengukuran yang sudah ada, termasuk percepatan pelaporan dan peningkatan disagregasi data, serta pengembangan instrumen baru. Selain itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat kapasitas kantor statistik di negara-negara, terutama di negara-negara miskin, serta lembaga statistik internasional. Indikator investasi dalam data dan pemantauan dapat digunakan untuk melacak investasi langsung dalam program-program ini, baik sebagai bagian dari bantuan pembangunan resmi atau sebagai persentase dari Pendapatan Nasional Bruto.

BAB 3

MENGENAL POHUWATO SEBAGAI WILAYAH UNGGULAN DI KAWASAN TELUK TOMINI

Sebelum menjadi daerah otonom, Kabupaten Pohuwato awalnya bagian dari Kabupaten Gorontalo. Pada 1999, Kabupaten Boalemo terbentuk dari Kabupaten Gorontalo, dengan wilayah hingga ke bagian barat Gorontalo, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, luasnya wilayah Boalemo dan perdebatan mengenai ibukota menciptakan aspirasi baru. Undang-Undang No. 50 tahun 1999 menetapkan Tilamuta sebagai ibukota sementara, namun perintah ini tidak diterima secara universal. Ketidakpuasan masyarakat di Tilamuta yang ingin tetap menjadi ibukota bertentangan dengan keinginan masyarakat di sekitar Marisa. Konflik ini mendorong pembentukan daerah otonom baru.

Masyarakat, bersama pemerintah dan stakeholder lainnya, mencari penyelesaian yang damai. Hasilnya adalah pembentukan Kabupaten Pohuwato berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2003. Proses ini merupakan tonggak awal dalam upaya membangun daerah yang lebih mandiri. Peringatan ulang tahun Kabupaten Pohuwato, ditetapkan pada 6 Mei setiap tahun, menggarisbawahi pentingnya perjuangan untuk kemandirian. Pada periode 2003–2005, kepemimpinan sementara memfokuskan pada pembentukan lembaga pemerintahan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dokumen perencanaan pembangunan, seperti Renstra dan GBHD, menjadi pedoman utama.

Seiring usianya yang menginjak 20 tahun, Kabupaten Pohuwato telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dalam konteks ini, ia seperti remaja yang berusaha memperbaiki diri untuk menjadi dewasa. Kabupaten ini telah menjadi pusat ekonomi, memiliki sumber daya alam yang potensial, dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya. Dengan potensi ini,

Kabupaten Pohuwato diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan daya saingnya, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, dalam kerangka NKRI.

A. KEDUDUKAN DAN POTENSI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO DI KAWASAN EKONOMI TELUK TOMINI

Kabupaten Pohuwato terletak di wilayah tengah Kawasan Teluk Tomini, menghadap langsung ke Pulau Togian, destinasi wisata internasional di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Perjalanan dari Kota Marisa ke Pulau Togian membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan speedboat. Dengan adanya pelabuhan ferry, Pohuwato dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan di sekitar Teluk Tomini. Letaknya juga berada di jalur utama Trans Sulawesi, memudahkan akses dari Sulawesi Tengah, Utara, dan Selatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tantangan di masa depan termasuk menjadikan Pohuwato pusat agroindustri, perdagangan, dan jasa di Kawasan Teluk Tomini serta menjadi lumbung pangan di Provinsi Gorontalo mendukung program ketahanan pangan nasional. Pentingnya pengembangan infrastruktur pelabuhan dan bandara untuk melayani wilayah Teluk Tomini, serta memperkuat konektivitas ke arah timur dan Program Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Timur menjadi perhatian utama.

1) Potensi Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Pohuwato memiliki potensi yang besar untuk pengembangan tanaman pangan, terutama pada lahan kering di dataran rendah dan tinggi. Potensi ini tersebar di hampir semua kecamatan di kabupaten tersebut. Dengan luas wilayah mencapai 4.244,31 km2 atau sekitar 34,75% dari total luas Provinsi Gorontalo, Pohuwato menawarkan beragam peluang pertanian. Hingga tahun 2022, sebagian besar lahan digunakan untuk sawah dengan luas 5.720 ha, sementara lahan kebun dan ladang masing-masing mencapai 45.524,50 ha dan 17.462,00 ha. Namun, ada juga sekitar 20.846,00 ha lahan yang tidak diusahakan. Kabupaten ini terkenal sebagai penghasil jagung terbesar di Gorontalo. Kecamatan Duhiadaa memiliki potensi pengembangan sawah padi yang besar, sedangkan untuk jagung, Kecamatan Randangan menjadi daerah dengan lahan dan produksi terbesar. Perkebunan kelapa, salah satu sub kelompok tanaman perkebunan yang luasnya mencapai sekitar 19.886 Ha, terutama

terdapat di Kecamatan Patilanggio. Meskipun begitu, pengelolaan tanaman perkebunan secara komersial masih belum optimal di kabupaten ini.

2) Potensi Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Pohuwato memiliki posisi strategis yang menghadap langsung ke Teluk Tomini, yang kaya akan keanekaragaman jenis ikan. Potensi perikanan di Teluk Tomini hingga Laut Seram mencapai 595.620 ton per tahun, namun baru sekitar 10 persen yang dimanfaatkan. Potensi ini mencakup budidaya perikanan, termasuk perikanan darat seperti tambak yang luasnya mencapai 3.898 ha, serta kolam dan empang seluas 1.582 ha. Pada subsektor perikanan tangkap, Pohuwato mencatat produksi terbesar di antara enam daerah lainnya pada tahun 2021, dengan total 27.084 ton, terutama didominasi oleh ikan pelagis. Sementara itu, pada subsektor perikanan budidaya, Pohuwato menghasilkan 22.795 ton, dengan pembenihan mencapai 31.500 ton, jaring apung 85 ton, dan tambak sederhana 22.683 ton. Dalam hal potensi kelautan, Kabupaten Pohuwato memiliki 51 pulau kecil, garis pantai sepanjang 86 mil atau 164 km, serta luas perairan teritorial sekitar 3.292,71 km². Wilayah ini juga memiliki ekosistem mangrove seluas 9.083 ha, terumbu karang seluas 2.747,81 ha, dan padang lamun seluas 975,92 ha. Meskipun begitu, baru sekitar 67,90 persen potensi perairan teritorial yang dimanfaatkan, dengan produksi mencapai 10.200 ton per tahun. Di samping itu, kekayaan laut di Kawasan Teluk Tomini, yang masuk dalam kewenangan Kabupaten Pohuwato, juga dapat menjadi potensi untuk pengembangan budidaya kerang mutiara.

3) Potensi Pariwisata

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pohuwato masih memerlukan peningkatan infrastruktur penunjang seperti akses jalan dan akomodasi serta kesadaran masyarakat tentang pengembangan industri pariwisata. Potensi pengembangan wisata budaya, wisata bahari dan wisata agro sangat besar di wilayah ini. Toluk Tomini dikenal sebagai teluk yang permukaan airnya relatif tenang serta memiliki keanekaragaman hayati dapat menjadi tujuan destinasi wisata, demikian juga pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Pohuwato sangat potensial

dikembangkan sebagai wisata bahari maupun diving. Peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Pohuwato akan memperkuat kedudukan daerah ini sebagai kawasan ekonomi di Teluk Tomini sebab akan membawa pendapatan tambahan bagi Kabupaten Pohuwato melalui pendapatan dari wisatawan, termasuk dari sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta berbagai aktivitas wisata lainnya. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Keberadaan potensi pariwisata yang kuat di Kabupaten Pohuwato akan memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata yang menarik di Teluk Tomini. Promosi yang baik akan menarik minat lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pohuwato tidak hanya akan meningkatkan daya tarik wisata daerah tersebut, tetapi juga akan memperkuat posisinya sebagai kawasan ekonomi yang penting di Teluk Tomini.

4) Potensi Pertambangan dan Energi

Kabupaten Pohuwato memiliki potensi pertambangan yang meliputi berbagai bahan tambang dan mineral berharga seperti emas, perak, tembaga, batu gamping, toseki, batu granit, sirtu, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, feldspar, dan lempung. Potensi ini memiliki nilai ekonomis yang signifikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan utama dalam sektor pertambangan adalah aktivitas illegal mining yang berdampak negatif.

Di sektor energi, pasokan listrik masih disalurkan oleh PT. PLN melalui dua Unit Operasi, yakni PLTD Marisa dan PLTMG Maleo, serta tujuh unit distribusi. Namun, PLN belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan listrik di Kabupaten Pohuwato meskipun potensi sumber energi listrik seperti energi air dari Sungai Randangan dan air terjun di Malango Kecamatan Taluditi, serta potensi PLTU (Marisa 2 x 15 MW) tersedia. Data dari PLN menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik terus meningkat, mencapai 38.218 pelanggan pada tahun 2020. Di samping itu, PDAM Tirta Maleo juga melayani kebutuhan air bersih, dengan 19.931 pelanggan pada tahun 2022, dimana 95 persen diantaranya adalah rumah tangga. Kecamatan Marisa menjadi wilayah

dengan jumlah pelanggan air bersih terbanyak di Kabupaten Pohuwato, dengan volume air yang disalurkan mencapai 181.092 M³.

5) Potensi Kehutanan

Kabupaten Pohuwato memiliki hutan paling luas di Provinsi Gorontalo. Kehadiran kawasan hutan yang luas, termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, memberikan peluang besar untuk pengembangan ekowisata. Pemandangan alam yang indah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem yang terjaga menjadi daya tarik wisatawan yang mencari pengalaman alam vang Pengembangan ekowisata akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui pariwisata dan industri terkait. Hutan-hutan di Pohuwato juga menyediakan sumber daya alam yang beragam, termasuk kayu, hasil hutan non-kayu, dan berbagai produk hutan lainnya. Pemanfaatan secara berkelanjutan dari sumber daya alam ini dapat mendukung industri kehutanan yang berkelanjutan, termasuk industri kayu dan non-kayu, yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

6) Potensi Industri, Perdagangan dan Investasi

Sektor industri kecil dan menengah menjadi fokus utama pemerintah daerah karena memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kabupaten Pohuwato memiliki beragam usaha industri yang mendukung perekonomian daerah, terutama dalam sektor kimia dan bahan bangunan. Pasar menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk bertransaksi barang dan jasa, dengan lebih dari tiga puluhan pasar aktif. Selain itu, didukung pula oleh koperasi yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, dengan variasi jenis koperasi seperti KUD, Kopas, KSU, KPRI, dan Koperasi Karyawan. Kedepannya, sektor industri kecil menengah, perdagangan, dan investasi akan terus berkembang, menjadikan Pohuwato sebagai pusat industri, jasa, dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini. Pada tahun 2045, diperkirakan jumlah usaha/industri kecil menengah akan terus berkembang hingga 10 hingga 15 ribu unit.

Kondisi di atas memberikan gambaran tentang peran penting sektor industri kecil dan menengah dalam perekonomian Kabupaten Pohuwato. Dengan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan beragamnya usaha industri yang ada, Pohuwato memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi di Kawasan Teluk Tomini. Pasar yang menjadi sarana utama transaksi barang dan jasa serta keberadaan koperasi yang beragam jenisnya, mencerminkan aktivitas ekonomi yang dinamis di Pohuwato. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah serta perdagangan di daerah tersebut. Dengan terus berkembangnya sektor industri kecil menengah, perdagangan, dan investasi, Pohuwato memiliki potensi untuk menjadi pusat industri, jasa, dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini. Proyeksi pertumbuhan jumlah usaha/industri kecil menengah yang signifikan hingga tahun 2045 juga menunjukkan potensi besar bagi Pohuwato untuk memperkuat kedudukannya sebagai kawasan ekonomi yang berpengaruh di Teluk Tomini.

B. DAYA SAING KABUPATEN POHUWATO

1) Daya Saing Ekonomi

Selama satu dekade terakhir, ekonomi Kabupaten Pohuwato telah mengalami penurunan dari 7.67% pada tahun 2013 menjadi 4.40% pada tahun 2023. Pandemi kemudian memperparah kondisi ini, menyebabkan penurunan lebih lanjut hingga mencapai -0.18%. Namun, terjadi sedikit perbaikan setelah itu, meskipun belum mencapai tingkat sebelum pandemi yang mencapai lebih dari 6%. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam merangsang pemulihan ekonomi tampaknya efektif.

Selain itu, kinerja ekonomi Kabupaten Pohuwato tercermin dalam pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam harga berlaku dan harga konstan selama sepuluh tahun terakhir. Nilai PDRB Awal Daerah Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2010 adalah Rp. 2,535,302.83, meningkat menjadi Rp. 8,110,691.30 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Pohuwato, dengan pertumbuhan yang konsisten. Di sisi lain, sektor lainnya cenderung mengalami fluktuasi.

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

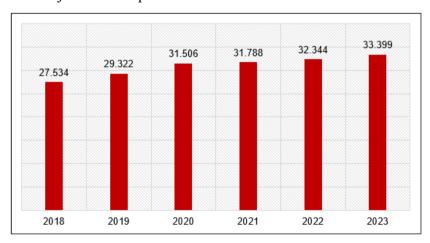
ANIB						<u> </u>	`	
Sektor		ADHB			ADHK			
PDRB	2010	2015	2020	2023	2010	2015	2020	2023
Pertanian,								
Kehutanan,	1,479,998.	2,699,507.	4,035,026.	4,651,868.	1,479,998.	2,048,911.	2,633,947.	2,802,523.
dan	03	90	73	80	03	66	93	73
Perikanan								
Pertambang								
an dan	36,797.36	42,949.37	52,204.54	61,520.40	36,797.36	38,530.92	38,370.49	42,265.39
Penggalian								
Industri	114,127.76	204,573.41	305,914.54	393,658.60	114,127.76	154,488.72	202,405.24	228,491.84
Pengolahan	114,127.70	204,373.41	303,914.34	393,038.00	114,127.70	134,466.72	202,403.24	220,491.04
Pengadaan								
Listrik dan	1,345.80	1,424.90	3,037.67	3,732.10	1,345.80	2,201.96	3,549.17	4,220.95
Gas								
Pengadaan								
Air,								
Pengelolaan	669.44	1,072.50	2,001.49	2,289.90	669.44	886.93	1,532.76	1,539.68
Sampah,	009.44	1,072.30	2,001.49	2,289.90	009.44	880.93	1,332.70	1,339.00
Limbah dan								
Daur Ulang								
Konstruksi	178,294.19	303,092.92	377,854.69	545,229.90	178,294.19	238,714.67	269,735.01	325,984.03

Perdaganga								
n Besar dan								
Eceran;	212 201 00	414 020 11	710 027 40	000 270 10	212 201 00	244 246 00	512 442 70	(42.202.47
Reparasi	212,201.09	414,829.11	719,927.49	989,279.10	212,201.09	344,246.08	513,443.79	642,302.47
Mobil dan Sepeda								
Motor								
Transportas								
i dan								
Pergudanga	66,778.37	144,272.81	189,658.89	235,500.70	66,778.37	120,149.77	145,364.00	159,462.84
n								
Penyediaan								
Akomodasi	30,682.47	49,403.90	75,807.28	91,855.40	30,682.47	39,986.89	55,050.98	64,283.87
dan Makan	30,062.47	49,403.90	73,807.28	91,633.40	30,062.47	39,900.09	33,030.96	04,283.87
Minum								
Informasi								
dan	34,916.37	60,179.00	92,263.84	99,705.80	34,916.37	53,052.64	80,295.24	85,518.54
Komunikasi								
Jasa								
Keuangan	44,519.88	88,719.04	156,092.65	172,882.90	44,519.88	67,740.41	106,199.43	100,901.34
dan				•			·	-
Asuransi	22 512 27	27.145.54	50 041 56	55.051.00	22 512 27	22 ((2 22	40 (21 07	42.501.10
Real Estate	22,513.37	37,145.54	52,941.76	55,951.90	22,513.37	32,662.32	42,631.07	43,591.18
Jasa Perusahaan	2,800.00	4,370.34	5,595.57	6,283.80	2,800.00	3,351.89	3,894.96	4,060.86

Administras i Pemerintah an, Pertahanan dan Jaminan	162,384.08	249,889.18	270,704.02	318,699.60	162,384.08	213,049.99	220,663.64	238,069.27
Sosial Wajib								
Jasa Pendidikan	51,881.14	104,063.81	169,702.96	197,756.60	51,881.14	85,198.35	115,947.28	126,098.22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,160.78	111,316.34	163,456.50	211,255.00	63,160.78	89,439.34	119,301.88	139,727.42
Jasa lainnya	32,232.68	52,821.73	63,905.92	73,220.60	32,232.68	45,234.46	49,995.95	53,482.12
PDRB	2,535,302. 83	4,569,631. 79	6,736,096. 55	8,110,691. 30	2,535,302. 83	3,577,847. 00	4,602,328. 82	5,062,523. 77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian danat menimbulkan risiko bagi keberlanjutan ekonomi Kabupaten Pohuwato. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan risiko iklim. Fokus yang terlalu besar pada sektor pertanian juga dapat menghambat diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan PDRB yang kuat adalah hal yang positif, Kabupaten Pohuwato perlu memperhatikan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Upaya diversifikasi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri, pariwisata, atau jasa yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

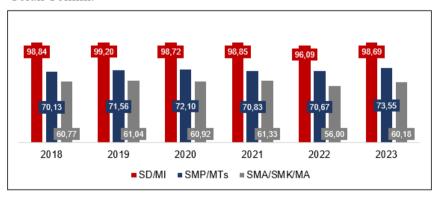
Gambar 2.1. Perkembangan PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Pohuwato Periode 2018-2023 (dalam rupiah)

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan yang signifikan dalam PDRB Per Kapita Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2018, PDRB per kapita mencapai Rp. 27.534,48, dan meningkat menjadi Rp. 29.321,52 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka tersebut

melonjak menjadi Rp. 31.506,34, kemudian terus naik menjadi Rp. 31.852,09 pada tahun 2021, dan mencapai Rp. 33.399,00 di tahun 2023. Peningkatan yang konsisten ini menandakan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data ini memperkuat posisi Kabupaten Pohuwato sebagai kawasan ekonomi yang semakin berkembang.

2) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merupakan kunci penting dalam menilai potensi sebuah wilayah untuk menjadi kawasan ekonomi unggulan. Aspek pendidikan, kesehatan, dan partisipasi angkatan kerja adalah indikator utama yang digunakan dalam mengevaluasi daya saing tersebut. Kabupaten Pohuwato, yang terletak di wilayah Teluk Tomini, memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan ekonomi unggulan. Tingkat pendidikan yang tinggi akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan luas, sementara kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat (Rizal, 2015). Partisipasi angkatan kerja yang tinggi juga mencerminkan dinamika ekonomi lokal (Gautama, 2024). Ketiga indikator ini, ketika dikelola dengan baik, akan berperan penting dalam mendukung daya saing Kabupaten Pohuwato dalam bersaing di pasar ekonomi global serta mewujudkan potensinya sebagai kawasan ekonomi unggulan di wilayah Teluk Tomini.



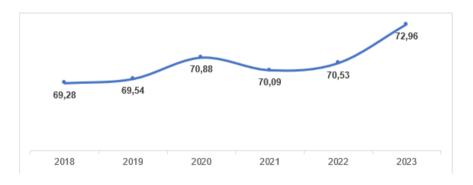
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.
Gambar 2.2. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Tahun
2018 – 2023

Secara umum, angka partisipasi murni untuk setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Pohuwato tergolong cukup baik. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat partisipasi murni (APM) pada tingkat pendidikan dasar, namun trennya kembali meningkat pada tahun 2023 untuk semua jenjang pendidikan. APM tingkat pendidikan dasar telah mencapai tingkat yang lumayan tinggi sejak pembentukannya dan terus meningkat hingga tahun 2018, bahkan melebihi 100 persen. Selain itu, angka partisipasi murni sekolah menengah pertama juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018, dengan tren peningkatan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, kinerja APM SMA masih menjadi perhatian penting dalam agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Pohuwato, terutama karena rata-rata lama sekolah hanya mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen per tahun selama periode 2018-2023.

Namun demikian, dari sisi Angka Melek Huruf (AMH), Pohuwato menunjukkan kinerja yang baik dengan mencapai 99,30 persen pada tahun 2017. Oleh karena itu, perlu adanya fokus pada program-program yang dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah guna memperbaiki perkembangan pendidikan di Kabupaten Pohuwato. Dalam konteks pembentukan kawasan ekonomi unggulan di wilayah Teluk Tomini, daya saing pendidikan SDM yang kuat sangat penting. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan, memperpanjang rata-rata lama sekolah, dan mempertahankan tingkat literasi yang tinggi akan membantu memperkuat potensi SDM Kabupaten Pohuwato. Dengan SDM yang unggul, akan lebih mudah untuk menarik investasi. mengembangkan industri lokal, dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mendukung terbentuknya kawasan ekonomi unggulan yang berkelanjutan dan kompetitif di wilayah Teluk Tomini.

Di sisi kesehatan, jumlah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan masih cukup tinggi, mencapai 21,68 persen dari total jumlah penduduk. Tantangan lain dalam sektor kesehatan adalah Usia Harapan Hidup saat lahir yang hanya mencapai 64,95 tahun (BPS Kabupaten Pohuwato, 2024), ini menunjukkan adanya ruang perbaikan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat pencapaian positif dalam penurunan angka stunting,

dimana data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat penurunan yang signifikan dari 34,6 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 6,4 persen pada tahun 2022 (Ayi, 2023). Kondisi kesehatan yang demikian mencerminkan tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan daya saing sumber dava manusia di Kabupaten Pohuwato. Tingginya persentase penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan serta rendahnya Usia Harapan Hidup menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan (Sulaiman, 2021). Namun, pencapaian positif dalam penurunan angka stunting menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks mendukung pembentukan kawasan ekonomi unggulan di wilayah Teluk Tomini, kesehatan yang baik menjadi faktor penting dalam produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan dan program-program kesejahteraan akan berperan penting dalam memperkuat daya saing SDM dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

Gambar 2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pohuwato, Tahun 2018 – 2023

Dari aspek ketenagakerjaan, selama lima tahun terakhir, Kabupaten Pohuwato mencatat peningkatan yang signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja, naik dari 69.28 persen pada tahun 2018 menjadi 72.96 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan

pertumbuhan jumlah individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, menandakan peningkatan kapasitas kerja di masyarakat. Fenomena ini dapat diindikasikan oleh peningkatan keterampilan, pendidikan, atau pelatihan yang diterima oleh penduduk setempat. Adanya pertumbuhan ini membawa potensi besar dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di Kabupaten Pohuwato. Dengan ketersediaan lebih banyak tenaga kerja, perusahaan dan sektor ekonomi lokal dapat memanfaatkan sumber daya manusia ini untuk meningkatkan output dan kinerja bisnis (Djunaidi & Alfitri, 2022).

3) Daya Saing Infrastruktur

Kondisi infrastruktur yang berkembang di Kabupaten Pohuwato memiliki implikasi yang signifikan terhadap daya saing daerah, terutama dalam mendukung pembentukan kawasan ekonomi unggulan di wilayah Teluk Tomini. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan dan aksesibilitas yang baik, dapat meningkatkan daya tarik investasi, memperlancar distribusi barang, dan memperluas pasar bagi pelaku usaha lokal. Pengembangan infrastruktur menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan Kabupaten Pohuwato, dengan prioritas pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Dengan total panjang jalan mencapai 1150,62 km, Kabupaten ini memiliki infrastruktur jalan yang luas, mendukung konektivitas antarwilayah dan mobilitas penduduk serta barang. Varian komposisi infrastruktur jalan, seperti jalan aspal, kerikil, dan tanah, mencerminkan tingkat pengembangan dan perawatan yang bervariasi. Di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Pohuwato meningkatkan kualitas jalan protokol di pusat ibu kota, seiring dengan pembangunan jalur drainase induk untuk mengatasi masalah genangan banjir. Pembangunan infrastruktur jembatan juga menjadi fokus, dengan pembangunan jembatan penghubung di beberapa kecamatan. Tambahan infrastruktur bandar udara, seperti pembangunan Bandara Panua Pohuwato, menjadi langkah positif dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

C. POTENSI PERTUMBUHAN WILAYAH

Kabupaten Pohuwato, yang terletak di leher Teluk Tomini dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sangat strategis sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Gorontalo. Dengan sektor pertanian (peternakan, kehutanan, dan perikanan) serta pertambangan dan bahan galian sebagai sektor unggulan, daerah ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Secara sosio-kultural, Pohuwato mencerminkan miniatur Nusantara di Gorontalo, di mana berbagai etnis dari seluruh Indonesia, termasuk transmigran dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dapat berbaur dengan warga lokal seperti etnis Minahasa, Sangihe, Bolaang Mongondow, Bugis, Toraja, dan penduduk asli lainnya, menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis dan damai.

Untuk menjadikan Kabupaten Pohuwato sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Gorontalo, langkah-langkah penting harus dilakukan. Pertama, mengidentifikasi potensi lokal di sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata sebagai landasan ekonomi yang kuat untuk masa depan. Kemudian, perlu diperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, fokus pada pengembangan sektor pertanian dengan meningkatkan produktivitas, melakukan diversifikasi tanaman, dan menerapkan teknologi pertanian modern. Demikian juga, sektor perikanan memerlukan perhatian khusus dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, akses pasar yang lebih baik, dan program pelatihan bagi nelayan pariwisata juga menjadi lokal. Promosi aspek penting, termasuk pengembangan objek wisata menarik, infrastruktur pariwisata yang berkualitas, dan pelatihan untuk pelaku pariwisata. Pengembangan industri kecil dan menengah harus didukung dengan pelatihan, akses modal, dan jaringan pasar yang luas. Selain itu, fokus juga diperlukan pada pembangunan SDM, kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga akademis, pemanfaatan teknologi informasi, promosi investasi, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Semua kecamatan di Kabupaten Pohuwato memiliki potensi ekonomi yang dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Marisa, sebagai pusat pemerintahan, memiliki potensi menjadi pelabuhan ekspor untuk produk pertanian dan perikanan. Langkah berikutnya adalah mengarahkan daerah sekitarnya untuk menjadi kawasan industri terpadu. Dengan beroperasinya bandar udara Panua di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, sebagai bandar

udara domestik, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran transportasi orang dan barang. Potensi ekonomi utama masyarakat nelayan dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dengan fokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas perikanan unggulan meliputi ikan bobara, ikan kerapu, udang lobster, vaname, gurita, teripang pasir, dan budidaya rumput laut. Kawasan seperti Duhiadaa, Randangan, Wonggarasi, dan Lemito memiliki potensi untuk dijadikan kawasan lumbung perikanan budidaya udang atau Shrimp Estate dengan menerapkan praktik budidaya yang baik. Pusat kota Marisa juga dapat berperan sebagai daerah penunjang dalam pengembangan ekonomi regional.

BAB 4

POTRET KEBERHASILAN SDGS KABUPATEN POHUWATO

A. POTRET CAPAIAN SDGS KABUPATEN POHUWATO

Dalam mendorong pencapaian indikator SDGs Kabupaten Pohuwato, maka, perlu dipetakan apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam pencapaian target SDGs guna mendorong terbentuknya kawasan ekonomi. Indikator dipetakan berdasarkan kategori capaian masing-masing pilar. Dari total 17 goals dan 169 indikator yang terbagi pada empat pilar, untuk Kabupaten Pohuwato ada 10 goals dan 22 indikator yang dapat diidentifikasi ketersediaan data sehingga dapat diproyeksi capaiannya.

Tercatat bahwa ada 10 (sepuluh) indikator SDGs yang proyeksinya diramalkan dapat memenuhi bahkan melampau target atau berada pada kategori A. Sementara indikator yang proyeksinya berada pada kategori B terdapat 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator berada pada kategori C, dan masing-masing 2 (dua) indikator berada pada kategori D dan E. Sedangkan sisanya tidak dapat dikategorikan. Ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 4 (empat) indikator yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Pohuwato.

1) Indikator 1.1.1 Kemiskinan Ekstrem

Indikator ini merupakan salah satu alat untuk memantau kemajuan dalam mencapai Target 1.1 SDGs, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk. Melalui pengukuran ini, pemerintah terkait dapat memahami sejauh mana negara atau wilayah mencapai target pengurangan kemiskinan dan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berisiko tinggi menjadi korban kemiskinan.

Tren angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pohuwato tercatat masih sangat tinggi yaitu 28.92% (kategori E). Sementara target SDGs

yang mesti dicapai adalah 7%. Meski begitu, angka kemiskinan ekstrem menunjukkan Kabupaten Pohuwato tren Rahkan menurun. diproyeksikan, di tahun 2030 angka kemiskinan ekstrem akan turun hingga 23.3%. Tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pohuwato menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Target SDGs adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrem menjadi 7% pada tahun 2030, ini menuntut adanya tindakan strategis dan program pencegahan kemiskinan yang efektif. Proyeksi penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 28.92% menuju 23.3% di tahun 2030 adalah kabar baik yang menandakan adanya perbaikan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

2) Indikator 1.2.1 Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional

Indikator 1.2.1 memiliki arti penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dengan memantau dan mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan ini, diharapkan negara-negara dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kebijakan dan program yang tepat dapat dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan dan sumber daya yang diperlukan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Data mencatat bahwa capaian persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 17.62%, dan diramalkan akan terus turun hingga 10.21% pada tahun 2030. Meski begitu, capaian ini masih jauh dari apa ditargetkan dalam SDGs yakni 7% sehingga indikator 1.2.1 untuk Kabupaten Pohuwato masih berada pada kategori D. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Capaian persentase yang masih tinggi menandakan adanya hambatan dalam upaya mengangkat masyarakat dari kondisi kemiskinan, dan ini menunjukkan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya pembangunan untuk mencapai target SDGs. Implikasi dari capaian yang rendah adanya kebutuhan untuk merumuskan adalah dan

mengimplementasikan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pohuwato. Kebijakan yang holistik dan terintegrasi perlu dipertimbangkan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan secara komprehensif. Capaian yang rendah juga dapat menunjukkan bahwa ada masalah struktural yang mendasari tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pohuwato. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu ditujukan pada mengatasi akar permasalahan seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak.

3) Indikator 10.1.1 (a) Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia

Tujuan indikator ini adalah untuk memahami dan mengukur tingkat kemiskinan di suatu negara atau wilayah berdasarkan jenis kelamin (lakilaki dan perempuan) dan kelompok usia tertentu. Data yang diperoleh dari indikator ini memberikan informasi penting tentang sejauh mana kesenjangan kemiskinan berdasarkan karakteristik tersebut membantu dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih inklusif dan berfokus pada kelompok yang rentan. Dalam konteks indikator ini, kemiskinan diukur dengan mengacu pada garis kemiskinan biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau badan-badan internasional. Garis kemiskinan ini merupakan ambang batas pendapatan atau konsumsi yang digunakan untuk membedakan antara individu atau keluarga yang hidup di bawah kondisi kemiskinan dan yang tidak.

Capaian indikator 10.1.1(a) Kabupaten Pohuwato tercatat bahwa persentase penduduk di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan usia sebesar 18.08% dan diproyeksikan akan terus turun hingga 15.17% pada tahun 2030. Meskipun menurun, capaian dan proyeksi dari indikator ini masih belum mampu memenuhi target SDGs yakni sebesar 9%. Menurunnya persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari 18.08% menjadi 15.17% hingga tahun 2030 adalah pencapaian positif yang mencerminkan upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait di Kabupaten Pohuwato. Meskipun belum mencapai target SDGs, penurunan ini mengindikasikan adanya progres dalam mereduksi kesenjangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Meskipun terdapat penurunan yang signifikan dalam persentase penduduk miskin, fakta bahwa angka ini masih jauh dari target SDGs (9%) mengisyaratkan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan yang lebih ambisius. Kabupaten Pohuwato mungkin perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang masih menjadi hambatan dalam mencapai target tersebut, seperti ketidaksetaraan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan sosial. Penting untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai program-program yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pohuwato. Apakah program-program tersebut sudah mencakup semua kelompok rentan, seperti anak-anak, remaja, perempuan, dan orang-orang dengan disabilitas atau apakah ada upaya khusus untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan kesehatan bagi kelompok yang terpinggirkan.

4) Indikator 17.1.1(a) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDB

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDB merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana kontribusi pajak yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (di tingkat lokal) terhadap total Produksi Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB mencerminkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pendapatan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDB juga memiliki peranan sebagai indikator untuk mengukur stabilitas keuangan pemerintah daerah. Jika rasio ini mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, ini dapat menunjukkan peningkatan kemampuan otonomi daerah dalam menghasilkan pendapatan pajak. Kehandalan keuangan daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan berkelanjutan.

Rasio pajak dalam tujuan pembangunan nasional (SDGs) ditargetkan meningkat hingga 8.87%. Di sisi lain, proporsi pendapatan pajak daerah Kabupaten Pohuwato terhadap produk domestik bruto terbilang kecil namun mengalami tren meningkat selama selang 2017 – 2022. Tahun 2017, rasio pajak daerah terhadap PDB sebesar 0.14% dan

0.15 di tahun 2022. Meskipun begitu, hasil analisis proyeksi menunjukkan bahwa di tahun 2030, proporsi pajak daerah terhadap PDB akan mengalami penurunan hingga 0.13% sehingga indikator ini terkategorikan D. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDB tidak selalu mudah dilakukan. Pemerintah daerah mungkin menghadapi tantangan seperti resistensi masyarakat terhadap pajak yang tinggi, rendahnya kapasitas administrasi, atau ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam merencanakan kebijakan pajak yang efektif dan berkelanjutan.

5) 9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Indikator SDGs 9.2.1 (a) mengukur laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) industri manufaktur. Ini adalah salah satu dari berbagai indikator yang digunakan untuk memantau kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB. Industri manufaktur memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai sektor yang berorientasi pada produksi barangbarang fisik, industri manufaktur seringkali menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerja, dan mendukung inovasi teknologi.

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur merupakan indikator yang penting karena mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara dalam sektor manufaktur. Pertumbuhan yang tinggi dalam sektor ini dapat menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sementara pertumbuhan yang lambat atau bahkan stagnan mungkin mengisyaratkan adanya tantangan atau masalah struktural dalam industri tersebut. Peningkatan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur juga dapat menjadi indikator kemajuan dalam mencapai beberapa target SDGs, seperti penciptaan lapangan kerja yang layak (SDG 8), peningkatan akses terhadap industri dan teknologi bagi semua (SDG 9), dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara negara-negara (SDG 10).

Badan Pusat Statistik mencatat, laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Kabupaten Pohuwato tahun 2023 adalah 4.7%. Capaian ini diproyeksikan akan terus tumbuh hingga 6.89% di tahun 2030. Meskipun diramal akan meningkat, pertumbuhan tersebut masih di bawah target

SDGs yang ditetapkan, yaitu 8.1%. Dengan demikian, indikator ini ditempatkan dalam kategori C, yang mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara capaian aktual dan target yang ditetapkan. Ini bisa disebabkan karena adanya keterbatasan yang menghambat pertumbuhan industri manufaktur seperti kurangnya investasi dan akses terhadap teknologi serta pasar yang lebih luas.

Kondisi tersebut bisa berdampak negatif pada kedudukan Pohuwato dalam pengembangan kawasan ekonomi di wilayah Teluk Tomini. Pertumbuhan PDB industri manufaktur yang masih di bawah target SDGs menandakan bahwa daerah tersebut mungkin mengalami hambatan dalam mengoptimalkan potensi ekonominya. Dengan pertumbuhan PDB industri manufaktur yang lebih rendah dari target, Pohuwato mungkin memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain dalam wilayah Teluk Tomini. Hal ini dapat mengurangi peluang kerjasama regional dan perdagangan antardaerah. Maka untuk mendorong capaian pertumbuhan PDB industri manufaktur, dibutuhkan jejaring kemitraan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

6) 2.2.1* Prevalensi stunting

Indikator SDGs 2.2.1 mengukur prevalensi stunting dalam populasi anak-anak di suatu negara atau wilayah. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan anak yang terjadi pada masa pertumbuhan awal, biasanya terjadi sebelum usia dua tahun, dan ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar yang diharapkan untuk usia tertentu. Prevalensi stunting merupakan persentase dari total populasi anak-anak yang mengalami kondisi stunting di suatu wilayah atau negara.

Prevalensi stunting adalah indikator penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Stunting merupakan indikator penting dari status gizi yang buruk dan ketidakcukupan gizi pada anak-anak, yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak serta produktivitas ekonomi di masa depan.

Penyebab stunting cukup kompleks dan seringkali melibatkan faktor-faktor yang berbeda, termasuk asupan gizi yang tidak memadai, akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas, praktek makan yang tidak sehat, sanitasi yang buruk, dan faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap penyakit infeksi (Martony, 2023). Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi prevalensi stunting memerlukan pendekatan yang lintas sektoral dan komprehensif, melibatkan kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya.

Pemerintah Pohuwato hanya dalam setahun, mampu menekan angka prevalensi stunting hingga 28,2%. Tahun 2021 prevalensi stunting Kabupaten Pohuwato berada di angka 34,6% persen. Lalu pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Pohuwato tersisa 6,4%. Capaian ini jauh melampaui target SDGs yang sebesar 14%. Ini membuktikan kerja keras pemerintah daerah dalam hal penurunan angka stunting di Pohuwato.

Berkenaan dengan upaya pengembangan Pohuwato sebagai kawasan ekonomi di Teluk Tomini, penurunan angka stunting berarti anak-anak di Pohuwato akan lebih sehat dan memiliki perkembangan yang lebih baik. Hal ini berpotensi menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan. Dengan berhasil menurunkan angka stunting, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang tadinya digunakan untuk penanganan stunting ke sektor-sektor lain yang mendukung pembangunan ekonomi, seperti pendidikan dan infrastruktur.

7) 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita

Indikator SDGs 8.1.1 mengukur laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita suatu negara atau wilayah. Laju pertumbuhan PDB per kapita adalah ukuran yang penting dalam mengevaluasi kesejahteraan ekonomi suatu populasi, karena mencerminkan pendapatan rata-rata yang tersedia bagi setiap individu dalam suatu negara. Indikator ini juga memungkinkan untuk memonitor kemajuan ekonomi dan perkembangan sosial suatu negara dari waktu ke waktu.

PDB per kapita adalah hasil bagi dari PDB suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Laju pertumbuhan PDB per kapita mencerminkan pertumbuhan ekonomi relatif terhadap pertumbuhan populasi. Jika laju pertumbuhan PDB per kapita positif, ini menandakan

bahwa pendapatan rata-rata masyarakat meningkat seiring waktu, sementara jika laju pertumbuhan negatif, ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata mungkin mengalami penurunan.

PDB per kapita yang tinggi sering kali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Namun, penting untuk diingat bahwa PDB per kapita sendiri tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi di dalam suatu negara. Meskipun suatu negara memiliki PDB per kapita yang tinggi, masih mungkin terdapat kesenjangan yang besar antara kelompok-kelompok penduduk dalam hal pendapatan dan akses terhadap sumber daya.

Untuk mencapai target SDGs terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDG 8), penting untuk memperhatikan pertumbuhan PDB per dan laju kapita upaya-upaya untuk meningkatkannya. Ini dapat mencakup kebijakan dan program-program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja yang layak, pemberdayaan ekonomi perempuan, pengurangan kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta perlindungan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selama satu dekade terakhir, ekonomi Kabupaten Pohuwato menyusut dari 7,67% pada tahun 2013 menjadi 4,40% pada 2023. Terdampak oleh pandemi, penurunan lebih lanjut terjadi, mencapai -0,18%. Meskipun ekonomi Kabupaten Pohuwato kini sedang membaik, namun belum mencapai tingkat sebelum pandemi yang melebihi 6%. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk merangsang pemulihan ekonomi mungkin efektif. Pertumbuhan PDB per kapita diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 6,41% pada 2030, namun tetap di bawah target SDGs sebesar 7%.

B. SINKRONISASI INDIKATOR SDGS KATEGORI D DAN E YANG BERSESUAIAN DENGAN RPJMD DAN IKU KABUPATEN POHUWATO

RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 merupakan tahapan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2005-2025, yang merupakan tahap terakhir atau keempat. Dokumen RPJMD ini merupakan perencanaan lanjutan yang bertujuan untuk mencapai kondisi Kabupaten Pohuwato pada tahun 2025. Isi dari RPJMD Kabupaten Pohuwato mencakup isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun internasional yang memiliki potensi untuk mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, kondisi lingkungan, dan aspek sosial di wilayah tersebut.

Isu-isu ini ter-refleksi dalam kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG) yang mencakup 17 Goals. Di samping itu, isu strategis nasional telah diuraikan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, dengan fokus pada beberapa agenda, antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas Polhuthankam dan transformasi pelayanan publik.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pohuwato merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan panduan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2009-2025. Untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang menitikberatkan pada terwujudnya daerah yang Sehat, Maju, dan Sejahtera, diperlukan perumusan strategi dan panduan kebijakan pembangunan dari tahun 2021 hingga 2026. Strategi dan kebijakan ini akan menggarisbawahi perencanaan yang komprehensif, berfokus pada tema tertentu, dan terintegrasi, untuk menunjukkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berupaya secara efisien dan efektif dalam mencapai visi, misi, tujuan, serta sasaran dan target kinerja RPJMD selama lima tahun ke depan.

Pentingnya sinergitas antara tujuan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional membuat perlu adanya sinkronisasi antara Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan Tujuan Pembangunan Nasional (SDGs). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat lokal dengan tujuan global yang tercakup dalam SDGs. Sinkronisasi ini membantu pemerintah daerah untuk fokus pada upaya yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya dalam jangka panjang, sehingga mengarahkan pembangunan lokal menuju tujuan yang lebih besar dan lebih berkelanjutan.

Dari total 22 indikator yang digunakan untuk menilai ketersediaan data, empat indikator termasuk dalam kategori D dan E, serta satu indikator berkategori C. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian yang jauh dari target tersebut. Proses evaluasi ini mencakup analisis terhadap hambatan, tantangan, dan kekurangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program atau kebijakan yang terkait dengan SDGs. Langkah awal dalam proses evaluasi ini adalah mengidentifikasi kesamaan antara prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tujuan SDGs. Dalam tahap ini, akan dipilih tujuan SDGs yang paling relevan dan dapat diintegrasikan dengan visi, misi, serta program-program yang telah ada dalam RPJMD.

C. PENENTUAN PRIORITAS KRITERIA PENCAPAIAN SDGS

Penentuan prioritas kriteria pencapaian SDGs dianalisis dengan menggunakan analisis AHP (Analytical Hierarchy Process). terdapat empat langkah penyelesaian sesuai dengan prinsip dasar pemecahan masalah dalam AHP, yang meliputi: decomposition, comparative judgement, synthesis of priority, dan logical consistency (Wijono, 2015).

1) Decomposition

Decomposition merupakan pendefinisian masalah yang digunakan untuk memecahkan masalah yang besar dan menyederhanakan permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang lebih kecil, dan di gambarkan dalam bentuk hirarki (Subiyantoro et al, 2022). Dalam hal ini AHP digunakan untuk menentukan bobot dari 5 kriteria yang telah ditentukan yaitu: Dukungan Regulasi, Menjadi Prioritas dalam RPJMD,

Dukungan Kelembagaan, Dukungan Anggaran, dan Adanya Jejaring Kemitraaan.

Metode AHP membantu memecahkan masalah kompleks melalui penentuan kriteria-kriteria yang disusun pada hirarki kemudian memberikan nilai bobot angka sebagai subtitusi dari pandangan atau persepsi ahli. Dengan diberikan suatu sintesis maka akan diketahui skala prioritas. Model hirarki dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Model AHP Prioritas Kriteria Pencapaian SDGs

Data perbandingan kriteria diambil dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 15 orang responden ahli yang terdiri dari tenaga ahli serta pakar dan pihak yang berhubungan langsung dengan pencapaian SDGs.

2) Comparative Judgement

Pada tahap ini dibuat penentuan prioritas elemen. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang di berikan dengan menggunakan bentuk matriks. Mengisi matrik perbandingan berpasangan yaitu dengan menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari satu elemen terhadap

elemen lainnya yang dimaksud dalam bentuk skala dari 1 sampai dengan 9. Skala ini mendefinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai 9 untuk pertimbangan dalam perbandingan berpasangan elemen pada setiap level hirarki terhadap suatu kreteria di level yang lebih tinggi. Apabila suatu elemen dalam matrik dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka diberi nilai 1. Jika i dibanding j mendapatkan nilai tertentu, maka j dibanding i merupakan kebalikkannya.

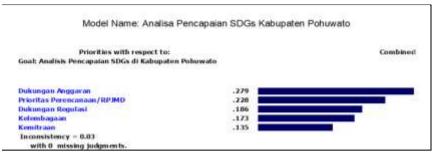
Berikut ini skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya.

- a. Skala 1: Kedua elemen sama penting.
- b. Skala 3: Elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lainnya.
- c. Skala 5: Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya.
- d. Skala 7: Elemen yang satu jelas sangat penting daripada elemen yang lainnya.
- e. Skala 9: Elemen yang satu mutlak sangat penting daripada elemen yang lainnya.
- f. Kebalikan: Jika elemen x mempunyai salah satu nilai di atas pada saat dibandingkan dengan elemen y, maka elemen y mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan elemen x

Oleh karena data diperoleh dari 15 responden, maka hasil dari kuesioner yang diberikan kepada responden selanjutnya disusun dalam matrik perbandingan kriteria. Untuk menghitung matrik perbandingan secara keseluruhan digunakan rata-rata geoetrik (geomean). Nilai rata-rata dihitung menggunakan rumus rata-rata geometrik (geometric mean).

3) Synthesis of Priority dan Logical Consistency

Hasil perhitungan bobot prioritas dan uji konsistensi dilakukan dengan menggunakan program Expert Choice 11. Hasilnya perhitungan prioritas dari kriteria faktor pencapaian SDGs untuk masing-masing responden dapat dilihat pada gambar berikut;



Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 4.2 Bobot Prioritas Faktor Pendukung Pencapaian SDGs

Gambar di atas menunjukkan hasil AHP diperoleh bobot vektor prioritas dari kriteria faktor pencapaian SDGs secara keseluruhan, yaitu:

- a. Dukungan Anggaran (0.279)
- b. Menjadi Prioritas Dalam RPJMD (0.228)
- c. Dukungan Regulasi (0.186)
- d. Dukungan Kelembagaan (0.173)
- e. Adanya Jejaring Kemitraaan (0.135)

Berdasarkan hasil tersebut nilai prioritas tertinggi adalah dukungan anggaran. Nilai *inconsistency ratio* pada kriteria di atas sebesar 0,03 yang menunjukkan bahwa hasil Analisis Hirarki Proses (AHP) dapat diterima karena nilai *inconsistency ratio* kurang dari 0,10 (10 persen).

Dari hasil tersebut, dapat diambil beberapa poin diskusi yang mendalam terkait urgensi kelima faktor tersebut dalam penanganan isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan (Gini ratio), peningkatan cakupan imunisasi dasar, mengurangi prevalensi stunting, meningkatkan share PDRB industri manufaktur, meningkatkan PDRB per kapita, dan peningkatan pajak daerah di Kabupaten Pohuwato. Dukungan anggaran memiliki bobot tertinggi, menunjukkan bahwa aspek dukungan finansial sangat krusial dalam penanganan isu SDGs. Anggaran yang memadai dapat digunakan untuk mendukung program-program anti-kemiskinan, peningkatan akses layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Selain itu, penetapan isu SDGs sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga penting sebagai

bentuk komitmen dan fokus pemerintah daerah dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Hal ini menjadi landasan bagi perencanaan dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Di sisi lain, faktor dukungan mencerminkan pentingnya regulasi mendukung yang implementasi kebijakan pro-SDGs. Regulasi yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan programprogram pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan cakupan imunisasi.

Faktor dukungan kelembagaan yang kuat dan efektif juga diperlukan untuk mengoordinasikan berbagai aspek penanganan isu SDGs. Dukungan kelembagaan dapat memastikan integrasi yang baik antar sektor dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program yang mendukung SDGs. Sementara itu, jejaring kemitraan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat diupayakan. Kemitraan yang baik dapat meningkatkan sinergi dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan SDGs, termasuk peningkatan pajak daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAB 5

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI POHUWATO

Pemetaan prioritas isu SDGs dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan kawasan ekonomi Pohuwato sangat penting karena dengan memetakan isu-isu SDGs, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memahami hubungan antara berbagai aspek pembangunan dan merumuskan strategi yang holistik. Selanjutnya, dengan memahami isu-isu SDGs yang paling relevan dengan kawasan ekonomi Pohuwato, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Pemetaan prioritas isu SDGs juga membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan kawasan ekonomi.

A. PRIORITAS ISU SDGS

Bobot skor prioritas isu merupakan hasil akumulasi antara skor rata-rata ranking isu yang dikalikan dengan bobot faktor pada AHP. Semakin kecil bobot skor isu, semakin penting isu tersebut untuk diprioritaskan. Hasil pembobotan skor isu SDGs di wilayah Kabupaten Pohuwato secara overall dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 5.1 Ranking Prioritas Isu SDGs

No	Isu	Bobot
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.608
2	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrim	0.630
3	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	0.875
4	Mengurangi Prevalensi Stunting	0.913

5	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0.986
6	Meningkatkan PDRB Per Kapita	0.987
7	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	1.045
8	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	1.160

Sumber: Data diolah, 2023

Data menunjukkan bahwa ranking prioritas tertinggi adalah isu mengurangi tingkat kemiskinan dengan bobot skor 0.608 diikuti oleh isu menghilangkan kemiskinan ekstrem di prioritas kedua dengan bobot sebesar 6.30. Prioritas ketiga dan seterusnya secara berturut-turut adalah isu meningkatkan pajak daerah/PAD dengan bobot 0.875, isu mengurangi prevalensi stunting dengan bobot 0.913, isu mengurangi ketimpangan dengan bobot 0.986, isu meningkatkan PDRB per kapita dengan bobot 0.987, isu meningkatkan cakupan imunisasi dasar dengan bobot 1.045, dan isu meningkatkan share PDRB industri manufaktur di ranking terakhir dengan bobot 1.160.

1. Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu utama dalam SDGs karena memiliki dampak yang merusak terhadap individu, komunitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mengurangi kemiskinan memerlukan kebijakan yang menyeluruh, termasuk program-program pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

2. Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, perumahan, dan layanan kesehatan. Upaya untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem memerlukan strategi yang lebih fokus dan intensif, seperti program bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap sumber daya.

3. Meningkatkan Pajak Daerah/PAD

Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak (PAD) adalah kunci untuk mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi perpajakan, peningkatan efisiensi

pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial di tingkat lokal.

4. Mengurangi Prevalensi Stunting

Upaya untuk mengurangi prevalensi stunting memerlukan intervensi yang komprehensif, termasuk pemberian makanan bergizi, perbaikan sanitasi, akses terhadap layanan kesehatan maternal dan anak, serta pendidikan gizi bagi masyarakat.

5. Mengurangi Ketimpangan

Ketimpangan dalam segala bentuk, baik itu ekonomi, sosial, atau gender, merupakan hambatan utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk mengurangi ketimpangan memerlukan kebijakan inklusif yang memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat, serta pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan.

6. Meningkatkan PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan PDRB per kapita memerlukan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

7. Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar

Imunisasi dasar merupakan salah satu intervensi kesehatan paling efektif untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan anak-anak. Peningkatan cakupan imunisasi dasar memerlukan upaya dalam meningkatkan akses, edukasi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi.

8. Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur

Pengembangan sektor industri manufaktur memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik. Upaya untuk meningkatkan share PDRB industri manufaktur memerlukan investasi dalam infrastruktur, teknologi, serta kebijakan yang mendukung pengembangan industri.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa isu menurunkan kemiskinan, meningkatkan pajak daerah, dan mengurangi prevalensi stunting sebagai isu yang harus diprioritaskan oleh pemerintah Pohuwato. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa semua isu yang tercakup dalam analisis memiliki relevansi dan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan terhadap isu-isu ini haruslah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan yang komprehensif dan terkoordinasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian isu-isu tersebut ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, serta melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan demikian, pemerintah Pohuwato dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Secara parsial, kedelapan isu tersebut diurutkan prioritasnya berdasarkan lima faktor pendukung pencapaian isu, seperti yang ditampilan pada tabel berikut;

Tabel 5.2 Prioritas Isu SDGs Berdasarkan Faktor Pendukung

No	Faktor/Isu	Bobot	
Duk	Dukungan Regulasi		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0,595	
2	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	0,595	
3	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	0,744	
4	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0,831	
5	Mengurangi Prevalensi Stunting	0,842	
6	Meningkatkan PDRB Per Kapita	0,954	
7	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	1,017	
8	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	1,116	
Dukungan RPJMD			
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0,576	
2	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	0,622	
3	Mengurangi Prevalensi Stunting	0,941	
4	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	1,094	
5	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	1,124	
6	Meningkatkan PDRB Per Kapita	1,169	

7	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	1,260	
8	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	1,413	
Duk	ungan Kelembagaan		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0,484	
2	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	0,519	
3	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	0,738	
4	Meningkatkan PDRB Per Kapita	0,830	
5	Mengurangi Prevalensi Stunting	0,842	
6	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0,865	
7	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	0,877	
8	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	1,072	
Duk	ungan Anggaran		
1	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	0,856	
2	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0,873	
3	Mengurangi Prevalensi Stunting	1,227	
4	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	1,247	
5	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	1,358	
6	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	1,414	
7	Meningkatkan PDRB Per Kapita	1,470	
8	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	1,598	
Duk	Dukungan Kemitraan		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0,513	
2	Meningkatkan PDRB Per Kapita	0,513	
3	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	0,522	
4	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	0,557	
5	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	0,603	
6	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	0,711	
7	Mengurangi Prevalensi Stunting	0,711	
8	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	0,729	

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel di atas mengidentifikasi skor prioritas isu berdasarkan faktor pendukung untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup Dukungan Anggaran, Dukungan Regulasi, Dukungan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Dukungan Kelembagaan, dan Dukungan Kemitraan. Dalam analisis tersebut, setiap faktor memiliki bobot prioritas yang menunjukkan urgensi dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs. Temuan utamanya adalah bahwa isu yang mendominasi prioritas di setiap faktor adalah penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan dukungan dalam berbagai aspek, seperti alokasi anggaran, regulasi, perencanaan pembangunan daerah, kelembagaan, dan kemitraan, diarahkan pada upaya menanggulangi kemiskinan sebagai langkah kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

9. Faktor Dukungan Regulasi

Hasil ranking bobot skor prioritas isu menunjukkan bahwa dalam konteks dukungan regulasi, prioritas utama adalah mengatasi kemiskinan. Artinya, dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, perlu dikawal dan diintervensi dengan regulasi yang ketat. Selain itu, terdapat pula serangkaian isu tambahan yang juga mendapatkan perhatian tinggi, seperti peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan pajak, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan anak melalui pengurangan stunting, memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan PDRB per kapita, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui cakupan imunisasi yang lebih luas, dan meningkatkan kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian daerah. Dengan memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung, upaya-upaya ini dapat dijalankan secara efektif untuk mencapai target-target SDGs yang berkaitan dengan faktor dukungan kelembagaan.

10.Faktor Dukungan RPJMD

Dalam aspek dukungan RPJMD, secara berturut-turut, ranking isu yang perlu diprioritaskan dalam perencanaan daerah adalah menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi prevalensi stunting, mengurangi ketimpangan atau Gini ratio, meningkatkan pajak daerah, meningkatkan PDRB per kapita, meningkatkan cakupan imunisasi dasar, dan meningkatkan share PDRB industri manufaktur. Kesimpulannya, dalam

konteks dukungan RPJMD, isu-isu yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi mendominasi prioritas. Penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan stunting, dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi fokus utama, diikuti oleh upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB per kapita dan share PDRB industri manufaktur. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui cakupan imunisasi dasar juga dianggap penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Dalam merespon hasil ranking isu yang telah ditentukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya disusun dengan memperhatikan prioritas isu-isu tersebut. RPJMD harus memuat tujuan dan sasaran yang jelas yang mencerminkan prioritas isu-isu yang telah diidentifikasi. Tujuan dan sasaran ini harus terukur, spesifik, terarah, relevan, dan dapat dicapai dalam jangka waktu RPJMD yang ditetapkan. Dengan terakomodirnya isu-isu prioritas di atas pada dokumen perencanaan, diharapkan pemerintah daerah dapat merancang rencana pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi, serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

11.Faktor Dukungan Kelembagaan

Dalam konteks dukungan kelembagaan, isu-isu tersebut memiliki posisi prioritas yang jelas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Penurunan tingkat kemiskinan mendominasi sebagai prioritas utama, diikuti oleh upaya untuk pendapatan daerah melalui meningkatkan peningkatan pajak. Selanjutnya, peningkatan PDRB per kapita menjadi fokus dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat, sementara upaya untuk mengatasi masalah kesehatan, seperti prevalensi stunting dan cakupan imunisasi dasar, berada pada ranking bawah bukan berarti isu tidak penting melainkan karena sejauh ini capaian kinerja pemerintah Pohuwato terkait isu kesehatan terbilang positif sehingga dalam periode ke depan, dukungan kelembagaan perlu diporsikan lebih untuk isu kemiskinan. Untuk merespons ranking isu tersebut, dukungan kelembagaan dapat diarahkan pada pengembangan program-program sosial dan ekonomi yang bertujuan langsung pada penurunan kemiskinan, khususnya bantuan yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong investasi dan inovasi dalam sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan PDRB per kapita, termasuk sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata.

12. Faktor Dukungan Anggaran

Dalam konteks dukungan anggaran, isu-isu tersebut mendapat penilaian sebagai prioritas yang harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas utama, diikuti oleh upaya untuk mengatasi masalah gizi buruk dengan mengurangi prevalensi stunting. Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan pajak juga diberikan perhatian yang signifikan, di samping upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui cakupan imunisasi dasar. Perlu dipastikan bahwa alokasi anggaran dalam APBD sesuai dengan prioritas isu yang telah ditetapkan. Lebih banyak anggaran harus dialokasikan untuk program-program yang mendukung penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Struktur APBD daerah seharusnya disusun dengan memperhatikan alokasi anggaran yang proporsional untuk setiap isu prioritas tersebut. Isu-isu yang memiliki ranking tinggi seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi perlu mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan dalam struktur APBD. Selain itu, dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian kebutuhan di lapangan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi setempat. Dalam mengalokasikan anggaran, harus berdasarkan data dan bukti yang jelas mengenai kebutuhan masyarakat serta dampak dari program-program yang diusulkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

13. Faktor Dukungan Kemitraan

Secara berturut, isu yang menjadi prioritas dalam perlu didukung dengan cara melibatkan kemitraan oleh pemerintah daerah adalah isu menurunkan kemiskinan, meningkatkan PDRB per kapita, meningkatkan pajak daerah, meningkatkan share PDRB industri manufaktur, meningkatkan cakupan imunisasi dasar, mengurangi prevalensi stunting,

dan mengurangi ketimpangan atau gini ratio. Isu-isu tersebut menunjukkan kebutuhan untuk kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan. Kolaborasi dan kemitraan dapat membantu mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas yang ada, serta memperluas jangkauan program-program yang dilaksanakan. Contoh program kerjasama kemitraan pemerintah daerah yang cocok dengan penanganan isu-isu tersebut antara lain:

a) Program Pemberdayaan Ekonomi Desa

Kemitraan antara pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan lokal, dan lembaga keuangan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur ekonomi desa guna meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan di tingkat lokal.

b) Kemitraan Industri dan Pendidikan

Kemitraan antara pemerintah daerah, industri manufaktur, dan institusi pendidikan untuk mengembangkan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, sehingga dapat meningkatkan PDRB per kapita dan mengurangi tingkat pengangguran.

c) Pembangunan Kawasan Industri Terpadu

Kemitraan antara pemerintah daerah, industri manufaktur, dan investor untuk mengembangkan kawasan industri terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur, akses transportasi yang baik, dan layanan pendukung lainnya dapat meningkatkan daya tarik investasi di daerah, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB daerah.

Secara overall, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat poin-poin penting yang berkaitan dengan keselarasan prioritas di mana terdapat keselarasan antara faktor-faktor yang dianalisis, terutama dalam mempertahankan isu kemiskinan sebagai prioritas utama. Memperhatikan capaian bobot masingmasing isu, kesadaran akan masalah sosial di tingkat daerah khususnya isu ketimpangan dan kemiskinan membutuhkan perhatian serius. Di sisi lain,

dalam mendorong penerimaan daerah dan PDRB Pohuwato perlu dilakukan transformasi ekonomi guna meningkatkan PDRB sektor sekunder dan tersier tanpa mengabaikan sektor primer (pertanian) sebagai komoditas ekonomi utama Kabupaten Pohuwato. Untuk mendorong sektor pertanian dan kelautan dalam peningkatan share PDRB industri manufaktur, Pemerintah perlu memperkuat integrasi antara sektor pertanian, kelautan, dan industri manufaktur dengan mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Ini termasuk pembangunan pabrik pengolahan makanan, minuman, dan produk-produk olahan lainnya yang menggunakan bahan baku dari sektor pertanian dan kelautan. mendorong investasi dalam pengembangan agroindustri dan industri perikanan yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, serta memperkenalkan teknologi modern dan inovasi dalam proses produksi pertanian, perikanan, dan pengolahan hasilnya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

B. KESENJANGAN ANTARA HARAPAN DAN REALISASI KEBIJAKAN

Tabel 5.4 Gap Ekspektasi dan Realisasi Implementasi Kebijakan Pencapaian Isu SDGs Kabupaten Pohuwato

No	Faktor/Isu	Bobot Gap		
Duk	Dukungan Regulasi			
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	-2,270		
2	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	-3,370		
3	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	-2,730		
4	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	-2,730		
5	Mengurangi Prevalensi Stunting	-2,000		
6	Meningkatkan PDRB Per Kapita	-2,470		
7	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	-2,600		
8	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	-2,870		
Duk	Dukungan RPJMD			
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	-2,870		
2	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	-2,400		

	Mengurangi Prevalensi Stunting	-2,130		
4	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	-3,000		
5	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	-2,730		
6	Meningkatkan PDRB Per Kapita	-2,730		
7	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	-2,530		
8	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	-2,600		
Duk	Dukungan Kelembagaan			
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	-2,400		
2	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	-2,200		
3	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	-3,000		
4	Meningkatkan PDRB Per Kapita	-2,470		
5	Mengurangi Prevalensi Stunting	-1,670		
6	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	-2,400		
7	Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	-2,470		
8	Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	-2,730		
Duk	Dukungan Anggaran			
1	Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	-2,600		
2	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	-2,800		
_		-2,000		
3	Mengurangi Prevalensi Stunting	-1,730		
	Mengurangi Prevalensi Stunting Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	·		
3		-1,730		
3	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	-1,730 -2,400		
3 4 5	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar	-1,730 -2,400 -2,670		
3 4 5 6	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	-1,730 -2,400 -2,670 -2,800		
3 4 5 6 7 8	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio Meningkatkan PDRB Per Kapita	-1,730 -2,400 -2,670 -2,800 -2,400		
3 4 5 6 7 8	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio Meningkatkan PDRB Per Kapita Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur	-1,730 -2,400 -2,670 -2,800 -2,400		
3 4 5 6 7 8 Duk	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio Meningkatkan PDRB Per Kapita Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur tungan Kemitraan	-1,730 -2,400 -2,670 -2,800 -2,400 -2,800		
3 4 5 6 7 8 Duk	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio Meningkatkan PDRB Per Kapita Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur tungan Kemitraan Mengurangi Tingkat Kemiskinan	-1,730 -2,400 -2,670 -2,800 -2,400 -2,800 -3,270		
3 4 5 6 7 8 Duk 1 2	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio Meningkatkan PDRB Per Kapita Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur tungan Kemitraan Mengurangi Tingkat Kemiskinan Meningkatkan PDRB Per Kapita	-1,730 -2,400 -2,670 -2,800 -2,400 -2,800 -3,270 -2,930		
3 4 5 6 7 8 Duk 1 2 3	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio Meningkatkan PDRB Per Kapita Meningkatkan Share PDRB Industri Manufaktur tungan Kemitraan Mengurangi Tingkat Kemiskinan Meningkatkan PDRB Per Kapita Meningkatkan PDRB DRB Per Kapita	-1,730 -2,400 -2,670 -2,800 -2,400 -2,800 -3,270 -2,930 -2,600		

7	Mengurangi Prevalensi Stunting	-2,530
8	Mengurangi Ketimpangan/Gini Ratio	-2,800

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam impelementasi kebijakan mengenai pencapaian isu SDGs, masih terdapat gap. Bobot gap merupakan selisih antara rata-rata skor kenyataan dengan ekspektasi. Nilai mines, mengindikasikan semakin lebar gap antara harapan responden dengan kenyataan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana ekspektasi atau harapan masyarakat terpenuhi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan membandingkan skor harapan dan skor realita, dapat diidentifikasi area di mana pencapaian SDGs telah memenuhi harapan atau bahkan melebihi, serta area di mana masih diperlukan perbaikan. Berdasarkan tabel di atas, kesenjangan antara fakta implementasi dari masingmasing faktor adalah sebagai berikut;

1. Faktor Dukungan Regulasi

Pada faktor dukungan regulasi, gap terlebar ada pada penanganan isu menghilangkan kemiskinan ekstrem dengan bobot gap -3,370, dan gap terkecil yakni -2,000 ada pada pengurangan prevalensi stunting. Ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem masih relatif lemah. Regulasi yang ada mungkin tidak cukup atau tidak tepat dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan ekstrem. Terindikasi ada kelemahan dalam regulasi yang tidak memadai untuk mengatasi masalah struktural yang menjadi penyebab kemiskinan. Selain itu, dukungan regulasi memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi program pengentasan kemiskinan. Kurangnya alokasi anggaran dapat menghambat efektivitas program tersebut.

2. Faktor Dukungan RPJMD

Pada faktor dukungan RPJMD, isu mengurangi ketimpangan atau gini ratio memiliki gap -3,000 yang berart program-program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kurang terakomodir dalam perencanaan daerah. Sementara isu mengurangi prevalensi stunting beroleh skor bobot gap terkecil yang menandakan bahwa program-program untuk isu ini

berjalan dengan efektif. Ini dibuktikan dengan menurunnya angka stunting di Kabupaten Pohuwato hingga mencapai 6.4%.

3. Faktor Dukungan Kelembagaan

Pada faktor dukungan kelembagaan, isu dengan gap terlebar adalah meningkatkan pajak daerah dengan bobot gap -3,000. Ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, dukungan terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Pohuwato masih kurang. Kesenjangan yang besar antara harapan dan kenyataan terkait isu ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam struktur pemerintahan daerah, khususnya pada unit-unit organisasi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Ini mencakup peningkatan kapasitas, perubahan regulasi yang mendukung, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman aparat daerah, serta memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Dengan cara ini, kelembagaan dapat menjadi motor utama kesuksesan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah.

4. Faktor Dukungan Anggaran

Pada faktor dukungan anggaran, terdapat tiga isu yang memiliki bobot yakni mengurangi kemiskinan, besar mengurangi ketimpangan/gini ratio, dan meningkatkan share PDRB industri manufaktur. Sementara, penanganan kemiskinan dan ketimpangan sosial dan memerlukan program-program redistribusi yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran yang signifikan. Sedangkan untuk meningkaktan kontribusi PDRB industri manufaktur memerlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, fasilitas produksi, dan peningkatan daya saing industri (Djadjuli, 2018). Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan dampak maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional juga dapat diupyakan guna membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam mendukung program-program pembangunan. Pihak swasta dapat berperan dalam investasi dan pengembangan proyek-proyek strategis, sementara lembaga internasional dapat memberikan bantuan teknis dan keuangan.

5. Faktor Dukungan Kemitraan

Pada faktor dukungan kemitraan, bobot gap paling besar yakni -3,270 terdapat pada isu mengurangi tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa dukungan kemitraan dalam rangka pelaksanaan program-program yang bertujuna untuk pengentasan kemiskinan masih sangat minim. Masih ada keterbatasan dalam kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak mitra dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Secara menyeluruh, kesenjangan yang signifikan ada dalam hal dukungan dari kemitraan. Meskipun upaya pengentasan masalah telah dilakukan, khususnya dalam konteks kemitraan, masih terdapat kesenjangan yang jauh dari harapan responden. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap program-program kemitraan yang sedang berjalan, serta kemungkinan perluasan atau perbaikan strategi yang diterapkan. Kemitraan memiliki peran krusial dalam memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor.

Lebih dari sekadar alat untuk meningkatkan efisiensi, kemitraan juga memungkinkan sinergitas sumber daya keuangan dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dalam program-program pembangunan (DKK, 2013). Melalui kolaborasi yang solid antara sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, kemitraan bisa menjadi katalisator untuk inovasi baru dan mempercepat perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan (Zein & Septiani, 2024).

Untuk menanggulangi kesenjangan yang terjadi dalam aspek kemitraan, langkah-langkah kebijakan yang mendukung kemitraan perlu dikembangkan oleh pemerintah. Hal ini termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi serta kolaborasi sektor swasta. Dengan meningkatkan dukungan terhadap kemitraan dan memastikan kolaborasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat lebih efektif mengatasi beragam masalah kompleks yang dihadapi masyarakatnya, mulai dari kemiskinan, ketimpangan, hingga permasalahan terkait dengan imunisasi dan pendapatan. Tindakan ini diharapkan akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

C. PELUANG DAN TANTANGAN PENCAPAIAN TARGET SDGS

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan sebuah pendekatan yang sangat berguna dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Mahfud, 2019). Kabupaten Pohuwato, dalam komitmennya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), tidak terkecuali membutuhkan pemetaan SWOT untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pencapaian target SDGs.

Dalam konteks ini, penulis menyoroti kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Kabupaten Pohuwato, berdasarkan faktor-faktor pendukung yang telah diuraikan sebelumnya. Setiap isu akan diidentifikasi SWOT berdasarkan faktor dukungan lembaga, dukungan anggaran, dukungan regulasi, RPJMD, maupun dukungan kemitraan. Dengan demikian, dapat diberikan pandangan yang lebih terperinci tentang bagaimana Kabupaten Pohuwato dapat mengoptimalkan potensi dan mengatasi hambatan dalam mencapai target-target SDGs secara efektif dan berkelanjutan baik secara kelembagaan, anggaran, perencanaan maupun kemitraan.

Diharapkan pemetaan SWOT ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang strategi yang perlu diambil oleh Kabupaten Pohuwato dalam menghadapi tantangan menuju pencapaian target-target SDGs. Dengan demikian, upaya menuju pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato dapat menjadi lebih terarah dan efektif sesuai dengan visi global untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan bagi semua.

1. Strengths (Kekuatan):

a. Isu kemiskinan dan kesehatan memperoleh bobot ranking tertinggi hampir di setiap faktor, menandakan dukungan pemerintah daerah terhadap isu ini sudah relatif baik dan berkelanjutan sehingga kebijakan ke depan, Pemerintah dapat berfokus untuk mengintervensi pencapaian isu lain yang selama ini kurang mendapat porsi lebih dalam kebijakan.

2. Weakness (Kelemahan):

 a. Prioritas rendah pada dukungan kemitraan, mengindikasikan faktor ini membutuhkan perhatian ekstra karena dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pencapaian SDGs.

- b. Isu prioritas yang berkaitan dengan program-program peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan PDRB kurang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah.
- c. Isu kemiskinan meskipun mendapatkan prioritas dalam berbagai dukungan, namun pencapaian target SDGs untuk isu kemiskinan masih jauh dari target.

3. Opportunities (Peluang):

- a. Faktor dukungan kemitraan jika dimaksimalkan bisa memberikan peluang untuk memperoleh sumber daya yang lebih besar dari pihak mitra untuk penanganan isu-isu ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- b. Meskipun berbeda dalam konteks dan lingkupnya, ada kesamaan dalam isu-isu tersebut yakni berhubungan dengan upaya untuk memperkuat basis ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti, program-program penanganan isu tersebut dapat dirancang saling beririsan sehingga dapat saling melengkapi dan meningkatkan efektivitasnya. Misalnya, program penurunan kemiskinan dapat terkait erat dengan program peningkatan PDRB per kapita karena pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi kemiskinan.

4. Threats (Ancaman):

- a. Implementasi faktor-faktor pendukung pencapaian target SDGs masih memiliki gap yang lebar antara realisasi dan ekspektasi, mengindikasikan bahwa masih lemahnya dukungan baik dari segi regulasi, anggaran, perencanaan, dan kemitraan.
- Situasi politik dan perubahan kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat mengganggu implementasi program-program pencapaian SDGs.
- Adanya perbedaan prioritas antara berbagai faktor dan instansi terkait dapat dapat menciptakan potensi konflik dalam alokasi sumber daya.

Analisis SWOT yang disajikan menggambarkan secara jelas kondisi Kabupaten Pohuwato dalam upaya mencapai target-target SDGs. Bahwa dari setiap isu, prioritas tertinggi yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah isu kemiskinan dan kesehatan. Kedua isu ini memiliki kekuatan dari segi dukungan kelembagaan, penganggaran dan perencanaan. Namun, meski mendapatkan prioritas, pencapaian target SDGs untuk isu ini masih jauh dari yang diharapkan, menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Pencapaian target SDGs di Kabupaten Pohuwato masih lemah dari sisi kemitraan. Padahal jejaring kemitraan yang kuat dapat menjadi kunci untuk mengatasi banyak tantangan dalam pencapaian SDGs. Meskipun isu kemiskinan mendapatkan prioritas, pencapaian target SDGs untuk isu ini masih jauh dari yang diharapkan, menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Di sisi lain, Pemerintah punya peluang dari segi kesamaan isu. Artinya, setiap isu memiliki irisan satu sama lain yang mengindikasikan jika satu isu tercapai, maka akan meningkatkan efektivitas pencapaian isu lainnya.

BAB 6

PENUTUP

Mencermati perjalanan yang telah dilalui Kabupaten Pohuwato dalam menghadapi peluang dan tantangan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Kabupaten ini telah berkomitmen untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan potensi lokal sambil mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Kita telah melihat bagaimana isuisu seperti kemiskinan, kesehatan, pendapatan daerah, dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam upaya pencapaian SDGs di Kabupaten Pohuwato. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan tantangan yang menghadang, seperti kurangnya dukungan kemitraan, koordinasi yang tidak selaras dalam perencanaan, dan ketidakpastian politik yang dapat mengganggu implementasi program-program pembangunan.

Dalam mengejar keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi di Wilayah Teluk Tomini, Kabupaten Pohuwato harus terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Sinergi yang kuat antara berbagai pihak akan memungkinkan Kabupaten Pohuwato untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada sambil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Fokus utama bagi pemerintah dan semua pihak terkait adalah memastikan inklusivitas dalam pembangunan. Setiap kebijakan dan program harus dirancang dengan memperhitungkan keberagaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, diharapkan bahwa buku ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang perjalanan Kabupaten Pohuwato dalam mencapai SDGs, sambil menawarkan wawasan yang berharga bagi pembaca mengenai jejak menuju keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi di Wilayah Teluk Tomini. Semoga upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh warga Kabupaten Pohuwato dan Indonesia pada umumnya.

REFERENSI

- Ayi. (2023). Angka Stunting Pohuwato Turun Drastis, Suharsi: Ini Hasil Kerja Kolaborasi. Gorontalo Post. https://gorontalopost.id/2023/02/09/angka-stunting-pohuwato-turun-drastis-suharsi-ini-hasil-kerja-kolaborasi/
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato. (2014). Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2024. Pohuwato: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2014). Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2024. Gorontalo: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
- BAPPENAS, B. P. P. N. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia (2nd ed.). Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 8-21.
- Djunaidi, D., & Alfitri, A. (2022). Dilema industri padat modal dan tuntutan tenaga kerja lokal. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(1), 29-40.
- DKK, P. D. P. (2013). Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Di Kota Surakarta (Studi Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Di Surakarta 2005-2009). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 4(1), 30-41.
- Gautama, R. P. (2024). Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pendapatan Pajak Provinsi Jawa Tengah: Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pendapatan Pajak Provinsi Jawa Tengah. Emerging Statistics and Data Science Journal, 2(1), 97-106.
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Mahfud, Mohamad Harisudin. "Metode penentuan faktor-faktor keberhasilan penting dalam analisis swot." AGRISAINTIFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian 3.2 (2019): 113-125.
- Martony, O. (2023). Stunting di Indonesia: Tantangan dan Solusi di Era Modern. Journal of Telenursing (JOTING), 5(2), 1734-1745.
- Payu, B. R., Panigoro, N., Tantawi, R., & Toralawe, Y. (2023). Economic Pillar Conditions Mapping in the Tomini Bay Area using SDGs Indicators. Gorontalo Development Review, 110-119.
- Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2022. Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden RI No. 59, Tahun 2017. Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Rizal, R. N. (2015). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia?. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 16(1), 2.
- Subiyantoro, E., Muslikh, A. R., Andarwati, M., Swalaganata, G., & Pamuji, F. Y. (2022). Analisis pemilihan media promosi UMKM untuk meningkatkan volume penjualan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika, 8(1), 1-8.
- Sulaiman, E. S. (2021). Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan: Teori dan implementasi. UGM PRESS.
- Susiana, S. (Ed.). (2015). Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. P3DI Setjen DPR.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Universitas Brawijaya Press.
- United Nations General Assembly. (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
- United Nations. (2012). The Future We Want: Outcome document adopted at Rio+20. United Nations.
- Wijono, Djoko & Idham Ibty. 2015. Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process Dalam Pengambilan Keputusan Penentuan Prioritas Program

Kerja Dompet Dhuafa Yogyakarta. Telaah Bisnis, Volume 16, Nomor 1, Juli 2015

Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance. Sada Kurnia Pustaka.

Perkembangan Kabupaten Pohuwato dan potensi Teluk Tomini dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi fokus penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Teluk Tomini, dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang kaya, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Kabupaten Pohuwato, sebagai bagian dari kawasan Teluk Tomini, memiliki peluang emas untuk menjadi pelopor dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan prinsip-prinsip SDGs.

Pentingnya memahami urgensi isu-isu pembangunan lokal dan nasional dalam pencapaian SDGs menjadi landasan utama dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan. Analisis terhadap capaian indikator SDGs Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa indikator yang sudah mencapai atau bahkan melampaui target, masih ada beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Buku ini membahas tentang upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Pohuwato, dengan fokus pada menggali potensi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pemahaman mendalam tentang situasi saat ini, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Pohuwato serta menjadi sumber inspirasi bagi upaya serupa di daerah lain.

Buku ini juga berusaha merangkul prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan memandang SDGs sebagai panduan komprehensif bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dicapai berkelanjutan, merata, dan memperhitungkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Melalui analisis mendalam terhadap capaian indikator SDGs, buku ini mencoba memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian, dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Diterbitkannya buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum dalam merangkul prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Harapannya, dengan adanya buku ini, bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dengan memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato.







CV. Tahta Media Group Surakarta, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.com Ig : tahtamediagroup Telp/WA : +62 896-5427-3996

